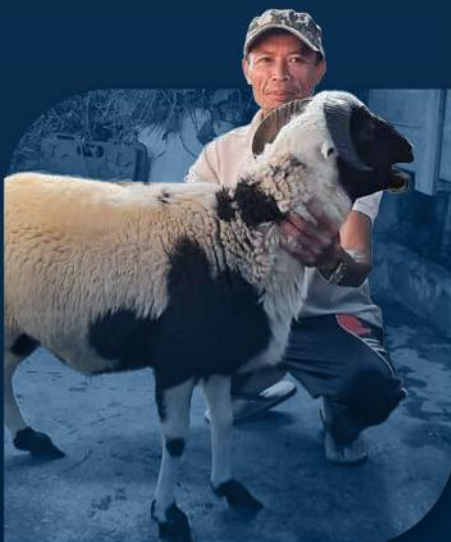


Meningkatkan Ikhtiar Memperluas Manfaat

Laporan Program
Kemaslahatan
2021



DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Tentang Tema	3
Ikhtisar Penting	4
Sambutan Kepala Badan Pelaksana BPKH	6
Sambutan Anggota Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan	8
Sambutan Deputi Bidang Kesekretariatan Badan & Kemaslahatan	11

01	TENTANG KAMI	
	Sekilas Bidang Kemaslahatan BPKH	16
	Profil Bidang Kemaslahatan BPKH	17
	Visi dan Misi	18
	<i>Roadmap</i> Kemaslahatan	19

02	MENYALURKAN NILAI MANFAAT	
	Dana Abadi Umat (DAU)	24
	Program Kemaslahatan	26
	Mekanisme Penyaluran Nilai Manfaat	28
	Pemantauan dan Evaluasi	34
	Sinergi Bersama Mitra Kemaslahatan	36

03	KEGIATAN KEMASLAHATAN	
	Kegiatan Kemaslahatan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	40
	Pelayanan Ibadah Haji	42
	Pendidikan dan Dakwah	44
	Kesehatan	47
	Sosial Keagamaan	50
	Ekonomi Umat	53
	Pembangunan Sarana Prasarana Ibadah	56

04	TATA KELOLA KEMASLAHATAN	
	Tata Kelola	60
	Organ Pengelola Program Kemaslahatan	62
	Manajemen Risiko	63
	Kode Etik	64
	Asas Pengelolaan Keuangan Haji	64
	Anti Korupsi	65
	Sistem Pelaporan Pelanggaran	65
	Insan Kemaslahatan	66
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	68
	Pelibatan Pemangku Kepentingan	69

05	TENTANG LAPORAN	
	Profil Pelaporan	72
	Penentuan Kandungan Laporan	73
	GRI Content Index - Core Option	75
	Indeks POJK-51/2017	77



MENINGKATKAN IKHTIAR, MEMPERLUAS MANFAAT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Program Kemaslahatan memiliki satu tujuan, yaitu meningkatkan manfaat bagi Kemaslahatan Umat Islam. Tahun 2021, merupakan tahun ketiga sejak diluncurkannya Program Kemaslahatan BPKH. Sesuai amanah yang diberikan, Bidang Kemaslahatan BPKH terus berupaya meningkatkan ikhtiar agar nilai manfaat Dana Abadi Umat dapat tersalurkan secara optimal. Sepanjang tahun 2021, berbagai Program

Kemaslahatan yang diselenggarakan telah berhasil menjangkau 34 Provinsi di Indonesia, yang diantaranya merupakan wilayah terpencil, terluar, tertinggal, mulai dari Aceh hingga pulau terluar Sebatik, serta wilayah lain seperti Papua dan Papua Barat. Selain itu, nilai penyaluran manfaat pada ruang lingkup ekonomi umat juga telah meningkat hingga 8 kali dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai manfaat ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kemandirian ekonomi umat.



IKHTISAR PENTING

PEROLEHAN NILAI MANFAAT DAU (Rp)

2021 **Rp237.615.583.591**

2020 **Rp229.223.554.228**

2019 **Rp223.753.032.351**

PROGRAM REGULER 6 RUANG LINGKUP

Rp189,446 M

Total realisasi program

34 Provinsi

Sebaran wilayah manfaat

NILAI MANFAAT TERDISTRIBUSI

2021 **Rp189.446.292.902**

2020 **Rp131.643.935.222***

2019 **Rp156.539.827.041**

* Penyajian ulang dikarenakan adanya koreksi data [102-48]





PENERIMA MANFAAT

BANTUAN PENDIDIKAN/BEASISWA

250

Unit mobil operasional Jemaah Haji dan Umroh

128

Beasiswa untuk Mahasiswa

7162

Al-Quran untuk 29 Provinsi

RENOVASI DAN PEMBANGUNAN

- 33 Asrama santri di pondok pesantren, madrasah, Yayasan pendidikan
- 68 Ruang kelas di pondok pesantren, madrasah, yayasan pendidikan
- 9 Fasilitas sanitasi dan air bersih bagi pondok pesantren
- 23 Fasilitas sanitasi dan air bersih bagi masjid
- 99 Masjid/mushola dan atau fasilitasnya

BANTUAN KENDARAAN OPERASIONAL

- 19 Unit mobil operasional Jemaah Haji dan Umroh
- 26 Unit kendaraan layanan untuk pondok pesantren, madrasah, yayasan pendidikan
- 48 Unit mobil Ambulance
- 39 Unit kendaraan layanan untuk masjid dan organisasi umat Islam

PAKET BANTUAN

- 500 Bantuan COVID kit, Imun booster, PCR test, paket makanan saji dll untuk warga yang membutuhkan termasuk korban bencana
- 41.634 Bantuan COVID kit, Imun booster, PCR test, paket makanan saji dll untuk warga
- 1.000 Ekor hewan qurban di 34 provinsi

BANTUAN ALAT KESEHATAN DAN PROGRAM COVID-19

- 4 Bantuan alat kesehatan untuk RS/klinik
- 2 Unit ventilator

PENINGKATAN EKONOMI UMAT

12

Bantuan alat produksi untuk koperasi dan kelompok usaha kecil

15

Bantuan usaha ternak untuk kelompok tani di Jawa Barat

2

Bantuan usaha ternak untuk pondok pesantren

SAMBUTAN KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI [102-14]

Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Q.S. At-Taubah: 105



Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Kutipan Q.S. At-Taubah 105 diatas merupakan salah satu dari banyak ayat yang menjelaskan tentang makna bekerja dalam Islam. Islam menuntun umatnya untuk senantiasa aktif bekerja yang bermaslahat bagi umat manusia dan senantiasa menyadari bahwa aktivitas yang dilakukan merupakan sarana untuk menjalankan amanah dan mencapai ridha Allah SWT.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sesuai mandatnya bekerja untuk Jemaah haji dan umat Islam. Melalui dana setoran awal, BPKH terus

mengoptimalkan nilai manfaatnya untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Melalui optimalisasi dana abadi umat, BPKH melaksanakan kegiatan Kemaslahatan umat. Kegiatan Kemaslahatan meliputi pendidikan dan dakwah, penyelenggaraan ibadah haji, sarana prasarana ibadah, kesehatan, ekonomi umat dan sosial keagamaan.

Sebagai catatan, pada tahun 2021 total penyaluran nilai manfaat Dana Abadi Umat mencapai Rp189 miliar. Angka ini meningkat 21% atau setara lebih dari 32 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kegiatan kemaslahatan yang dilaksanakan juga meningkat cukup signifikan, dari 185 kegiatan pada tahun 2020, naik menjadi 450 kegiatan di tahun 2021.

Pencapaian ini mustahil terlampaui tanpa dedikasi, kerja keras dan kesungguhan ikhtiar dari Bidang Kemaslahatan dengan mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien di tengah keterbatasan yang dipicu oleh tantangan eksternal dan internal.

Secara eksternal, pandemi COVID-19 yang meski sudah cukup terkendali di tahun 2021, namun dampaknya masih tetap kuat dirasakan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Upaya merealisasikan Program Kemaslahatan juga masih terdampak akibat kebijakan pembatasan mobilitas yang berlaku. Secara internal, Bidang Kemaslahatan masih menghadapi tantangan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

Berkat dukungan dedikasi dan totalitasnya, BPKH Bersama Mitra Kemaslahatan mampu menghadirkan program-program Kemaslahatan penting dalam kurun waktu lima tahun. Jika sebelumnya, BPKH menjalankan kegiatan Kemaslahatan bertumpu pada pembangunan masjid dan sarana ibadah, maka di masa pandemik 2020-2021, BPKH hadir dengan berbagai program bantuan dampak COVID-19, pendidikan serta pengadaan alat kesehatan dan mobil-mobil ambulans. Di tahun 2022, kegiatan Kemaslahatan bervariasi meliputi sosial keagamaan, sarana prasarana dan pemberdayaan ekonomi umat.

Tahun 2022 ini merupakan tahun terakhir masa tugas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas periode 2017-2022. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya, sebagai Kepala Badan Pelaksana BPKH,

hendak menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi secara khusus kepada insan Kemaslahatan yang telah menunjukkan kinerja yang baik.

Saya juga berharap semoga kinerja yang telah ditunjukkan tetap terus terjaga dan akan selalu mewarnai kinerja Bidang Kemaslahatan di masa mendatang. Dengan demikian Bidang Kemaslahatan akan mampu menciptakan inovasi dan upaya yang mampu meningkatkan kemaslahatan umat.

Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pemangku kepentingan, kepada Pemerintah Indonesia, Mitra Kemaslahatan, Penerima Manfaat dan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungannya selama ini.

Semoga Allah senantiasa meridhoi ikhtiar mulia ini dalam meningkatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan umat Islam. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Badan Pelaksana BPKH

Anggito Abimanyu



SAMBUTAN ANGGOTA BIDANG KESEKRETARIATAN BADAN DAN KEMASLAHATAN



Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Pelaksanaan kinerja bidang Kemaslahatan di tahun 2021 ini masih dibayangi oleh Pandemi COVID-19 yang dampaknya terus dirasakan oleh masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Meski demikian kondisi pandemi COVID-19 yang cukup terkendali berkat program nasional pengendalian COVID-19 yang dilakukan pemerintah seperti program vaksinasi dan lain-lain memberikan ruang bagi Bidang Kemaslahatan untuk meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan mandatnya menyalurkan nilai manfaat DAU untuk kemaslahatan umat.

Program Kemaslahatan COVID-19

Seiring dengan kondisi pandemi COVID-19 yang cukup terkendali di dalam negeri, Program Kemaslahatan COVID-19 yang diselenggarakan oleh Bidang Kemaslahatan BPKH sebagai bentuk

respon dan dukungan untuk percepatan dan penanggulangan pandemi COVID-19 juga ikut terkoreksi secara signifikan.

Pada periode sebelumnya, besaran alokasi nilai manfaat yang disalurkan untuk mendukung Program Kemaslahatan COVID-19 sangat masif yakni mencapai Rp44,259 miliar atau setara dengan 28% dari keseluruhan dana yang disalurkan pada Program Kemaslahatan. Maka sepanjang tahun 2021, Program Kemaslahatan COVID-19 yang disalurkan hanya sebesar Rp3,5 miliar. Penyaluran nilai manfaat juga dikonsentrasikan hanya pada ruang lingkup kesehatan saja. Demikian juga wilayah yang menjadi sasaran program ini hanya pada wilayah dengan kasus COVID-19 tinggi saja seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Adapun program yang dilaksanakan juga lebih spesifik pada upaya pencegahan (kuratif) dan penyembuhan (preventif), selain bersifat

kemanusiaan yang ditujukan pada masyarakat yang terdampak maupun tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Diantaranya, bantuan alat kesehatan untuk membantu pemerintah menanggulangi COVID-19 seperti ventilator, bantuan Alat Pelindung Diri (APD), paket imun *booster* COVID Kit, makanan siap saji untuk mendukung program isoman warga dan penyuluhan hidup sehat.

Program Kemaslahatan Reguler

Sepanjang tahun 2021, kegiatan Program Kemaslahatan berhasil menjangkau 34 Provinsi di Indonesia. Sebaran bantuan BPKH selama ini basisnya adalah jemaah haji tunggu, sehingga proporsi alokasi sebaran kegiatan Kemaslahatan mengikuti jumlah jemaah haji tunggu pada provinsi tersebut. Namun demikian, terdapat kegiatan Kemaslahatan yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang basis jemaah haji, melalui alokasi kuota nasional.

Melalui inovasi dan strategi yang dilakukan, pelaksanaan kegiatan Kemaslahatan sepanjang tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Diantaranya nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) yang disalurkan dapat ditingkatkan hingga 21% dibandingkan tahun 2020 dengan total nilai mencapai Rp189 miliar.

Salah satu inovasi yang dilakukan adalah implementasi strategi akselerasi proses pengajuan

dan persetujuan proposal yakni, (i) Penambahan sumber daya pada Mitra Kemaslahatan untuk mempercepat proses verifikasi lapangan terkait proposal yang masuk, dan (ii) meningkatkan proses Analisa dan kajian internal. Strategi ini berhasil meningkatkan serapan anggaran hingga mencapai 93,3% dari total alokasi sebesar Rp194 miliar.

Dengan kinerja penyerapan anggaran yang lebih besar, diharapkan kegiatan yang diselenggarakan dapat menjangkau penerima manfaat yang lebih luas dan kemaslahatan yang diciptakan semakin berkualitas. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan melalui program sinergi dan kolaborasi bersama Mitra Kemaslahatan sepanjang tahun 2021 ini, jumlah penerima manfaat Program Kemaslahatan BPKH diperkirakan mencapai lebih dari 380.000 penerima manfaat.

Meski demikian, pencapaian ini tidak terlepas dari sejumlah catatan yang menjadi bahan evaluasi dan upaya perbaikan di masa mendatang.

Rencana Strategis 2021 Program Kemaslahatan BPKH

Kami memandang, peningkatan kinerja Bidang Kemaslahatan yang signifikan dan membanggakan sepanjang tahun ini juga tidak terlepas dari pembenahan yang dilakukan secara internal.



Pada tahun 2021, Bidang Kemaslahatan merealisasikan rencana strategis Program Kemaslahatan yang telah diagendakan sejak periode sebelumnya yakni melakukan restrukturisasi dengan melakukan pemekaran menjadi dua divisi, yakni Divisi Registrasi dan Analisa Kemaslahatan dan Divisi Pelaksanaan dan Monev Kemaslahatan.

Dengan restrukturisasi ini, Program Kemaslahatan BPKH telah memiliki alat kelengkapan yang lebih mumpuni sehingga mampu mendukung kinerja yang efektif dan efisien, sekaligus meningkatkan kualitas penerapan tata kelola yang baik.

Selain itu, Program Kemaslahatan pada tahun 2021 juga telah menginisiasi pengembangan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Program Kemaslahatan atau e-Kemaslahatan yg bertujuan meningkatkan digitalisasi proses bisnis kemaslahatan agar lebih transparan dan akuntabel.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kemaslahatan yang didesain untuk meningkatkan efisiensi dalam percepatan registrasi dan Analisa proposal ini direncanakan akan terlaksana pada tahun 2022. Beroperasinya SIM ini menjadi signifikan mengingat jumlah anggaran Program Kemaslahatan diprediksi akan terus meningkat menjadi Rp230 miliar, dengan ekspektasi jumlah persetujuan proposal mencapai 500 proposal atau dua kali lebih banyak dari Program Kemaslahatan tahun 2021.

Sampai Triwulan IV tahun 2021, Bidang Kemaslahatan juga telah berhasil merampungkan agenda penyusunan *Standard Operation Prosedure* (SOP) yang akan memberikan panduan mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Sehingga kinerja tata kelola organisasi dapat ditingkatkan yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kinerja Program Kemaslahatan.

Pencapaian lain yang signifikan dari kinerja 2021 adalah berhasil disusunnya rencana kerja dan strategi keberlanjutan (*roadmap*) terhadap Program Kemaslahatan untuk 5 (lima) tahun (2021-2025) yang tertuang dalam bentuk Buku BPKH Bermaslahat.

Dengan adanya Buku BPKH Bermaslahat ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Kemaslahatan dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan.

Penutup

Seluruh kinerja yang berhasil dicapai dalam penyelenggaraan Program Kemaslahatan sepanjang tahun 2021 ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dengan Mitra Kemaslahatan. Kami menyadari terbatasnya sumber daya yang dimiliki Bidang Kemaslahatan menjadikan sinergi dan kolaborasi dengan Mitra Kemaslahatan yang memiliki jejaring di seluruh provinsi di tanah air menjadi sangat signifikan dalam mendukung terlaksananya kegiatan dengan tepat sasaran. Kami berharap, kemitraan ini akan terus ditingkatkan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kinerja kami sepanjang 2021 ini. Teriring doa dan harapan semoga ikhtiar yang kami lakukan melalui Program Kemaslahatan akan mampu mempercepat target pembangunan nasional dan secara khusus meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat Islam di seluruh Indonesia.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anggota Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH

Rahmat Hidayat

SAMBUTAN DEPUTI BIDANG KEMASLAHATAN



Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, segala puji dan syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, hingga saat ini kita masih mampu bertahan, melewati masa pandemi, meskipun perjuangan memerangi wabah COVID-19 belum berakhir. Bidang Kemaslahatan BPKH sangat memahami pentingnya sebuah kesungguhan dalam ikhtiar, baik itu untuk menghadapi pandemi, maupun untuk mencapai segala tujuan yang dikehendaki.

Penyusunan *Roadmap* Kemaslahatan BPKH di tahun 2021, merupakan salah satu bentuk kesungguhan BPKH, khususnya Bidang Kemaslahatan, untuk mencapai tujuan memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dokumen *Roadmap* Kemaslahatan ini tidak hanya menunjukkan profesionalitas BPKH sebagai

lembaga pengelolaan keuangan, namun juga sebagai pedoman tertulis untuk melakukan prioritas dan pentahapan Program Kemaslahatan untuk lima tahun mendatang. Sehingga Program Kemaslahatan dapat dijalankan secara lebih terstruktur, efisien dan efektif.

Di tahun ketiga sejak diluncurkannya Program Kemaslahatan BPKH pada tanggal 19 Oktober 2018, Bidang Kemaslahatan telah menyetujui sebanyak 281 proposal kegiatan dari 1.422 proposal yang diterima di sepanjang tahun 2021. Meskipun hanya sekitar 19% dari proposal yang diterima, namun jumlah persetujuan proposal telah meningkat sebanyak 51% dari tahun sebelumnya. Seluruh proposal telah melalui proses sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan prosedur yang berlaku serta dilakukan secara transparan.

Bidang Kemaslahatan telah menyalurkan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) sebesar 189 miliar rupiah, meningkat 21% dibandingkan tahun

2020. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan juga meningkat dari 185 kegiatan pada tahun 2020 menjadi 450 kegiatan di tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan Kemaslahatan dilakukan dengan tetap mempertahankan sinergitas dengan 11 Mitra Kemaslahatan yang telah ditetapkan BPKH dan memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan di sepanjang tahun 2021, telah mencakup 6 (enam) kelompok kegiatan atau ruang lingkup kemaslahatan, sesuai Peraturan BPKH Nomor 2 Tahun 2019, yaitu pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta sarana dan prasarana ibadah. Kegiatan-kegiatan tersebut tersebar pelaksanaannya di 34 provinsi di Indonesia dan telah berkontribusi pada pencapaian 7 sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada ruang lingkup pelayanan ibadah haji, meskipun keberangkatan Jemaah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi dibatalkan oleh Pemerintah Indonesia, Program Kemaslahatan tetap menunjukkan dukungannya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada umat Islam Indonesia. Hal ini dilakukan melalui kegiatan pengadaan sarana digitalisasi manasik haji dan pengadaan kendaraan operasional untuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU).

Pada ruang lingkup Pendidikan dan Dakwah, kegiatan Kemaslahatan masih ditekankan pada penguatan fungsi strategis pondok pesantren, yaitu sebagai pusat pendidikan, lembaga dakwah dan lembaga pemberdayaan. Dukungan telah diberikan kepada 185 pondok pesantren, madrasah dan Yayasan pendidikan di Indonesia dalam bentuk pembenahan sarana dan prasarana. Selain itu kami juga telah memberikan Beasiswa kepada 128 pelajar Perguruan Tinggi, melalui program beasiswa “Sang Surya Lazismu” dan “Beasiswa Lazisnu”. Kegiatan ini merupakan inovasi terbaru yang diharapkan mampu meningkatkan motivasi pelajar umat Islam untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.

Pada ruang lingkup kesehatan, kegiatan yang dilaksanakan diantaranya masih dalam bentuk kontribusi BPKH dalam merespon pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Kami juga membantu dalam pengadaan air bersih bagi masyarakat korban gempa di Lumajang. Dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat yang berada di daerah perairan, kami memberikan bantuan 3 unit ambulan terapung kepada puskesmas Sungai Karawang, Puskesmas Air Putih dan Puskesmas Galing di Kalimantan Barat.

Pada ruang lingkup sosial keagamaan yang ditujukan untuk meningkatkan peran serta organisasi massa Islam dalam mencapai kemaslahatan umat, dukungan diberikan melalui bantuan pengadaan sarana dan prasarana operasional bagi masjid dan organisasi umat Islam, sehingga mereka dapat memaksimalkan perannya. Kegiatan tanggap darurat juga dilakukan untuk meringankan beban para korban bencana alam, bantuan diberikan diantaranya kepada korban bencana banjir, tanah longsor dan gempa di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Jakarta, Jawa Barat, Tangerang, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur.

Program Berkah Qurban, merupakan salah satu kegiatan unggulan kami pada ruang lingkup sosial keagamaan. Sebanyak 1.000 ekor sapi telah didistribusikan, mulai dari Aceh hingga Papua. Kegiatan ini mampu menjangkau wilayah-wilayah terpencil, terluar, tertinggal dan terdampak bencana, secara total wilayah yang berhasil dijangkau sebanyak 835 titik lokasi di 34 provinsi di Indonesia.

Pada ruang lingkup ekonomi umat, penyaluran nilai manfaat DAAU telah meningkat sebesar 8 kali dibandingkan tahun 2020. Selain dukungan berupa pengadaan sarana dan prasarana, penekanan kegiatan juga dilakukan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi umat, yaitu program Balai Ternak. Program ini diselenggarakan bagi 15 kelompok ternak di wilayah Kabupaten Bandung dan 10 kelompok ternak di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Peningkatan nilai manfaat yang disalurkan,

merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi umat secara lebih luas.

Sementara pada ruang lingkup sarana dan prasarana, masjid dan musholla yang merupakan tempat beribadah umat Islam, tetap menjadi sasaran kegiatan Kemaslahatan di sepanjang tahun 2021. Kegiatan Kemaslahatan telah membantu membangun dan atau merehabilitasi 99 masjid dan musholla di seluruh Indonesia. Kami juga telah menyelenggarakan program Tebar Al-Qur'an di 29 provinsi. Sebanyak 11.110 mushaf Al-Qur'an didistribusikan keseluruh wilayah di Indonesia dalam rangka membumikan Al-Qur'an di Indonesia.

Seluruh capaian kinerja di tahun 2021 ini merupakan buah dari kesungguhan ikhtiar, tidak hanya Insan Kemaslahatan, namun juga Mitra Kemaslahatan, serta dukungan dari berbagai pihak pemerintah, masyarakat dan lembaga lainnya, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Melalui sinergitas dan kolaborasi, kami mampu menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi.

Sejalan dengan tagline Tujuan Pembangunan Berkelanjutan "*no one left behind*", kami akan terus berupaya untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk daerah tertinggal, terluar dan

terdepan (3T) wilayah tanah air, untuk meningkatkan kemaslahatan umat di tanah air.

Akhir kata, apresiasi dan terima kasih kami sampaikan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung kinerja kami di sepanjang tahun 2021.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan
BPKH

Emir Rio Krishna





01

T E N T A N G K A M I





SEKILAS BIDANG KEMASLAHATAN

Bidang Kemaslahatan adalah salah satu unit kerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang memiliki tugas dan fungsi khusus untuk menyalurkan nilai manfaat yang bersumber dari Dana Abadi Umat (DAU) sebagaimana diatur Pasal 17 UU No. 34/2014.

Mandat khusus ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Kemaslahatan yang mulai diluncurkan sejak 19 Oktober 2018. Bidang Kemaslahatan mengawal dan memastikan pelaksanaan Program Kemaslahatan itu senantiasa selaras dengan visi dan misi BPKH, khususnya misi kelima yaitu memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam.



PROFIL BIDANG KEMASLAHATAN [102-1]

KEGIATAN YANG DIJALANKAN [102-2]

Menyalurkan nilai manfaat yang bersumber dari Dana Abadi Umat melalui kegiatan-kegiatan sosial untuk kemaslahatan umat islam.

SIFAT ORGANISASI DAN DASAR HUKUM [102-5]

Bidang yang berada di bawah naungan badan hukum publik pengelolaan keuangan haji atau BPKH.

Dasar hukum yang terkait dengan pembentukan bidang Kemaslahatan:

1. UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji
3. Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji

SKALA ORGANISASI [102-7]

Per 31 Desember 2021

JUMLAH TOTAL PEGAWAI BIDANG KEMASLAHATAN


 **9** orang


NILAI DANA ABADI UMAT

 **3,69 T**

ALAMAT KANTOR PUSAT [102-3]

**Menara Bidakara 1, lantai 8
Jalan Gatot Subroto, Kav. 71-73 Pancoran,
Jakarta Selatan 12870, Indonesia**

 (021) 83793001

 Call Center Kemaslahatan
08882298820

 kemaslahatan@bpkh.go.id

 www.bpkh.go.id

PASAR YANG DILAYANI [102-6]

Masyarakat di seluruh Indonesia
Jemaah haji di Indonesia dan di Arab Saudi

WILAYAH OPERASIONAL [102-4] Indonesia



Sebagai lembaga keuangan yang memiliki badan hukum yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, di tahun 2021, BPKH menguatkan

kredibilitasnya dengan menetapkan visi dan misi Kemaslahatan. Visi dan misi ini selanjutnya melandasi tujuan Program Kemaslahatan yang dilaksanakan oleh Bidang Kemaslahatan.



VISI

Menjadi penyelenggara Program Kemaslahatan bereputasi internasional.



MISI

1. Menjalankan Program Kemaslahatan secara akuntabel dan transparan melalui optimasi nilai manfaat DAU.
2. Menjalin sinergi dengan Mitra Kemaslahatan secara profesional untuk memperluas cakupan wilayah dan penerima manfaat Program Kemaslahatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat.

ROADMAP KEMASLAHATAN

Di tahun 2021, Bidang Kemaslahatan BPKH telah menyusun dan mensahkan rencana strategis 5 (lima) tahun dalam menjalankan perannya untuk menyelenggarakan Program Kemaslahatan. Rencana strategis ini disusun sebagai bentuk

komitmen Bidang Kemaslahatan untuk mewujudkan visi Kemaslahatan, yaitu menjadi penyelenggara Program Kemaslahatan yang bereputasi internasional, secara terukur, terarah dan sistematis.

ROADMAP KEMASLAHATAN 2021-2025



Aspek Kuantitatif Kinerja Utama

	TAHAP 01 (2021)	TAHAP 02 (2022-2023)	TAHAP 03 (2024-2025)
	Penguatan Infrastruktur Kemaslahatan	Optimasi Kemaslahatan	Integrasi Ekosistem Kemaslahatan
1. Pencapaian kegiatan Kemaslahatan untuk masing-masing ruang lingkup	 75%	 90%	 100%
2. Pencapaian dukungan terhadap program SDGs sesuai kebijakan Kemaslahatan yang ditetapkan	 10 Program	 12 Program	 14 Program
3. <i>Branding</i> kelembagaan yang diukur dari hasil survei kepuasan penerima manfaat (skala Likert 1-4)	 >3,00	 >3,50	 >3,75
4. Cakupan jangkauan kewilayahan kegiatan Kemaslahatan hingga daerah 3T	34 provinsi dan 25% kabupaten/kota	34 provinsi dan 50% kabupaten/kota	34 provinsi dan 75% kabupaten/kota
5. Jumlah Mitra Kemaslahatan aktif	8 mitra	12 mitra	16 mitra





Setiap tahapan dalam *roadmap* dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran strategis dan inisiatif strategis serta indikator pencapaian. Terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis Program Kemaslahatan (yang dipilah dalam 2 kelompok yaitu kelompok pengungkit (*drivers*) dan kelompok hasil (*results*)).

Pengelompokkan tersebut didasarkan atas pendekatan hubungan sebab akibat (*cause and effect*), bahwa sasaran strategis dalam kelompok *drivers* merupakan *cause*, sedangkan yang berada pada kelompok *results* merupakan *effect* dari *cause* tersebut.

Result

SS1. Meningkatkan keragaman dan kualitas kegiatan Kemaslahatan

SS2. Meningkatkan cakupan layanan kewilayahan termasuk daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan)

Drivers

SS3. Terjalinnya sinergi dengan pemangku kepentingan secara profesional

SS4. Mengoptimalkan pengelolaan dana Kemaslahatan secara akuntabel

SS5. Memperkuat pengelolaan risiko Kemaslahatan

SS6. Meningkatkan sinkronisasi ketentuan operasional

SS7. Memperkuat integrasi platform sistem informasi manajemen Kemaslahatan

SS8. Meningkatkan kapabilitas organisasi dan SDM Kemaslahatan



02

**MENYALURKAN
NILAI MANFAAT**





Program
Kemaslahatan BPKH



BERKAH QURBAN 1442 H

MASJID RAHMATAN LIL'ALAMIN
BOGOR, JAWA BARAT





DANA ABADI UMAT

Dana Abadi Umat (DAU) adalah sejumlah dana yang dikelola oleh Kementerian Agama dan merupakan bagian dari dana haji sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Dana itu diperoleh dari hasil pengembangan dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Kementerian Agama kemudian melimpahkan mandat pengelolaan DAU kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada tahun 2018. [103-1]

Undang-Undang yang sama juga mengamanatkan pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam.

Sebagai upaya menjaga amanat tersebut, pokok DAU ditempatkan atau diinvestasikan pada instrumen yang memiliki tingkat atau profil risiko rendah dengan tetap memenuhi kriteria instrumen penempatan DAU sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 mengatur penempatan Dana Haji yang didalamnya mencakup DAU, dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah dan investasi. Untuk selanjutnya setelah 3 tahun BPKH terbentuk, besaran proporsi dalam bentuk penempatan produk perbankan syariah maksimum 30% dan 70% dalam bentuk investasi. [103-2]

Nilai manfaat atau hasil pengembangan Dana Haji ini kemudian dikelola untuk meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Nilai manfaat atau hasil pengembangan Dana Haji yang



berasal dari Dana Abadi Umat (DAU) inilah yang kemudian dialokasikan untuk mendanai Program Kemaslahatan yang diselenggarakan oleh Bidang Kemaslahatan BPKH. [103-3]

Legitimasi ini dikuatkan oleh keputusan ijtima ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia

ke VI tahun 2018 yang menetapkan penggunaan nilai manfaat DAU dibolehkan selama digunakan untuk kemaslahatan umat dengan baik. Nilai manfaat DAU yang dapat digunakan untuk kegiatan Kemaslahatan pada periode tahun berjalan, paling banyak sama dengan total nilai manfaat DAU dari tahun sebelumnya.

NILAI MANFAAT YANG DIHASILKAN DAN DISALURKAN [201-1]

	2021	2020	2019
Nilai pokok DAU (Rp)	3.698.625.127.602	3.578.600.057.835	3.570.529.860.018
Nilai manfaat yang dihasilkan (Rp)	237.615.583.591	229.223.554.228	223.753.032.351
Nilai manfaat yang disalurkan (Rp)	189.446.292.902	131.643.935.222*	156.539.827.041
Sisa nilai manfaat (Rp)	48.169.290.689	97.579.619.006*	67.213.205.310

* Penyajian ulang dikarenakan adanya koreksi data [102-48]

		2021	2020	2019
Nilai penempatan DAU	Investasi	3.576.925.940.410	3.311.864.162.851	3.318.869.779.732
	Bank Syariah	121.699.187.192	266.735.894.984	251.660.080.286
Nilai manfaat yang dihasilkan	Investasi	228.031.911.391	218.126.977.195	194.997.643.601
	Bank Syariah	9.583.672.200	11.096.577.033	28.755.388.750



PROGRAM KEMASLAHATAN

Program Kemaslahatan mulai diluncurkan sejak akhir tahun 2018 dan implementasinya dirancang dengan mengacu pada prinsip *Maqashid Syariah*. Prinsip ini memandang tujuan dari penetapan sebuah hukum adalah untuk meraih kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat alias kemaslahatan. *Maqashid Syariah* meyakini ada 5 tujuan penetapan hukum yang kemudian disepakati menjadi lima pilar Program Kemaslahatan.



PILAR PROGRAM KEMASLAHATAN SESUAI DENGAN MAQASHID SYARIAH:



Program Kemaslahatan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dari Bidang Kemaslahatan yang berada di bawah supervisi Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan. Unit ini memiliki wewenang dalam penyaluran nilai manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan DAU untuk mencapai tujuan pengelolaan dana untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui kegiatan Kemaslahatan.

Penentuan kegiatan yang akan didukung oleh Program Kemaslahatan haruslah memperhatikan dasar hukum yang berlaku dan menjaga agar kegiatan Kemaslahatan tidak berpotensi melanggar hukum atau bertentangan dengan perundangan yang berlaku serta yang paling utama adalah tidak melanggar asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

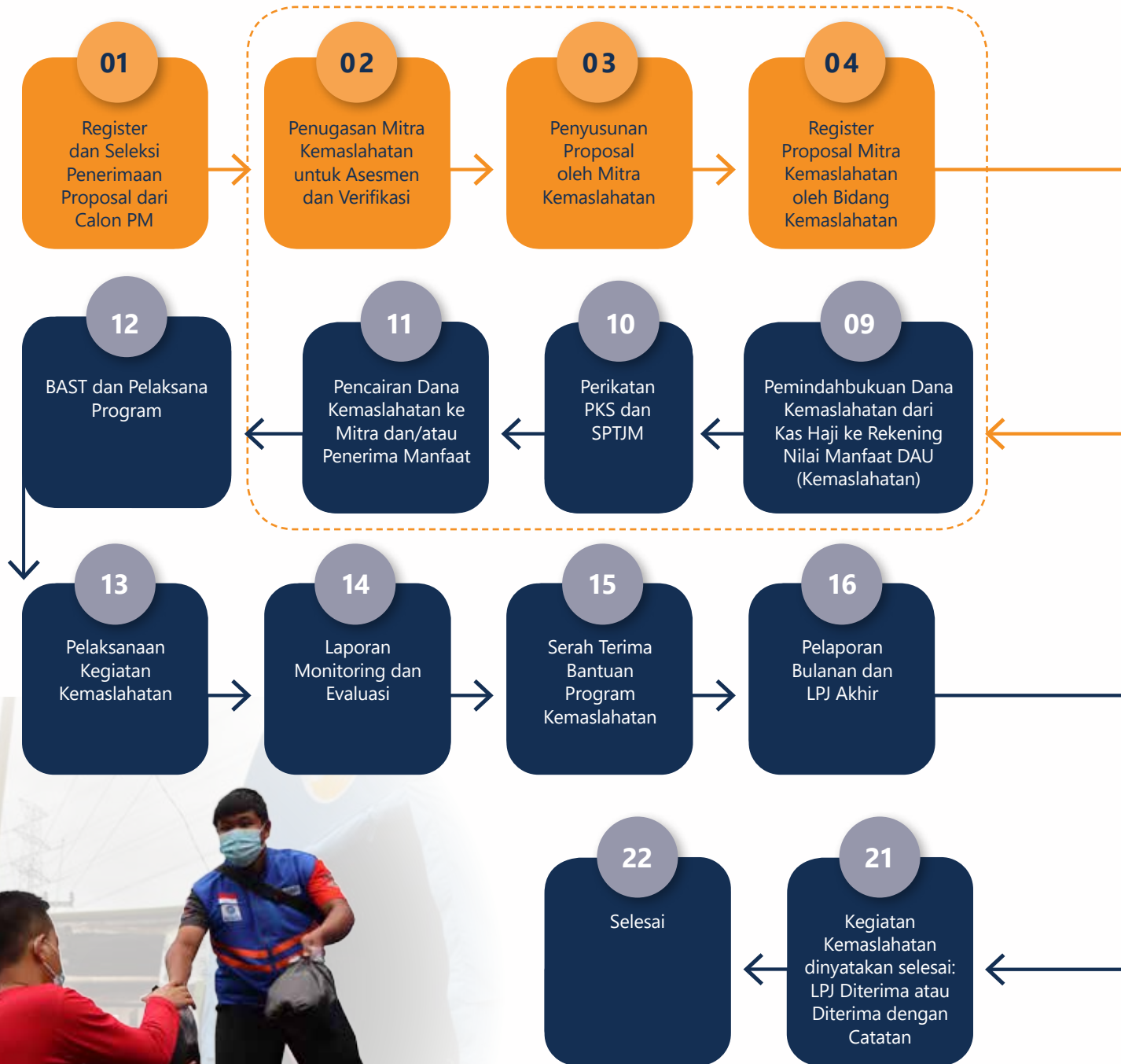


DASAR HUKUM PROGRAM KEMASLAHATAN BPKH:



1. Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
3. Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji
4. Peraturan BPKH No. 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat
5. Peraturan BPKH No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPKH No. 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat
6. Peraturan BPKH No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPKH No. 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat
7. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 2 Tahun 2018 tentang Kriteria, Persyaratan, Penetapan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Mitra Kemaslahatan dan Penerima Manfaat Kegiatan Kemaslahatan
8. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan
9. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan
10. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan
11. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan
12. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan
13. Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan

MEKANISME PENYALURAN NILAI MANFAAT





Kritikal Proses yang penting dan membutuhkan waktu sehingga perlu dipertimbangkan strategi untuk efektifitas.



Proses bisnis pada Divisi Registrasi dan Analisa Kemaslahatan



Proses bisnis pada Divisi Pelaksanaan dan Money Kemaslahatan

Sebagai upaya untuk menjaga akuntabilitas Program Kemaslahatan, Bidang Kemaslahatan telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2015. Pendekatan ini memastikan setiap tahapan dalam proses penyaluran nilai manfaat mulai dari penerimaan proposal hingga Kegiatan Kemaslahatan dinyatakan selesai, dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Pada tahun 2021, dalam rangka meningkatkan penyerapan anggaran, Program Kemaslahatan mengimplementasikan strategi akselerasi proses pengajuan dan persetujuan proposal yakni, (i) Penambahan sumber daya pada Mitra Kemaslahatan untuk mempercepat proses verifikasi

terkait proposal yang masuk, dan (ii) meningkatkan proses analisa dan kajian internal.

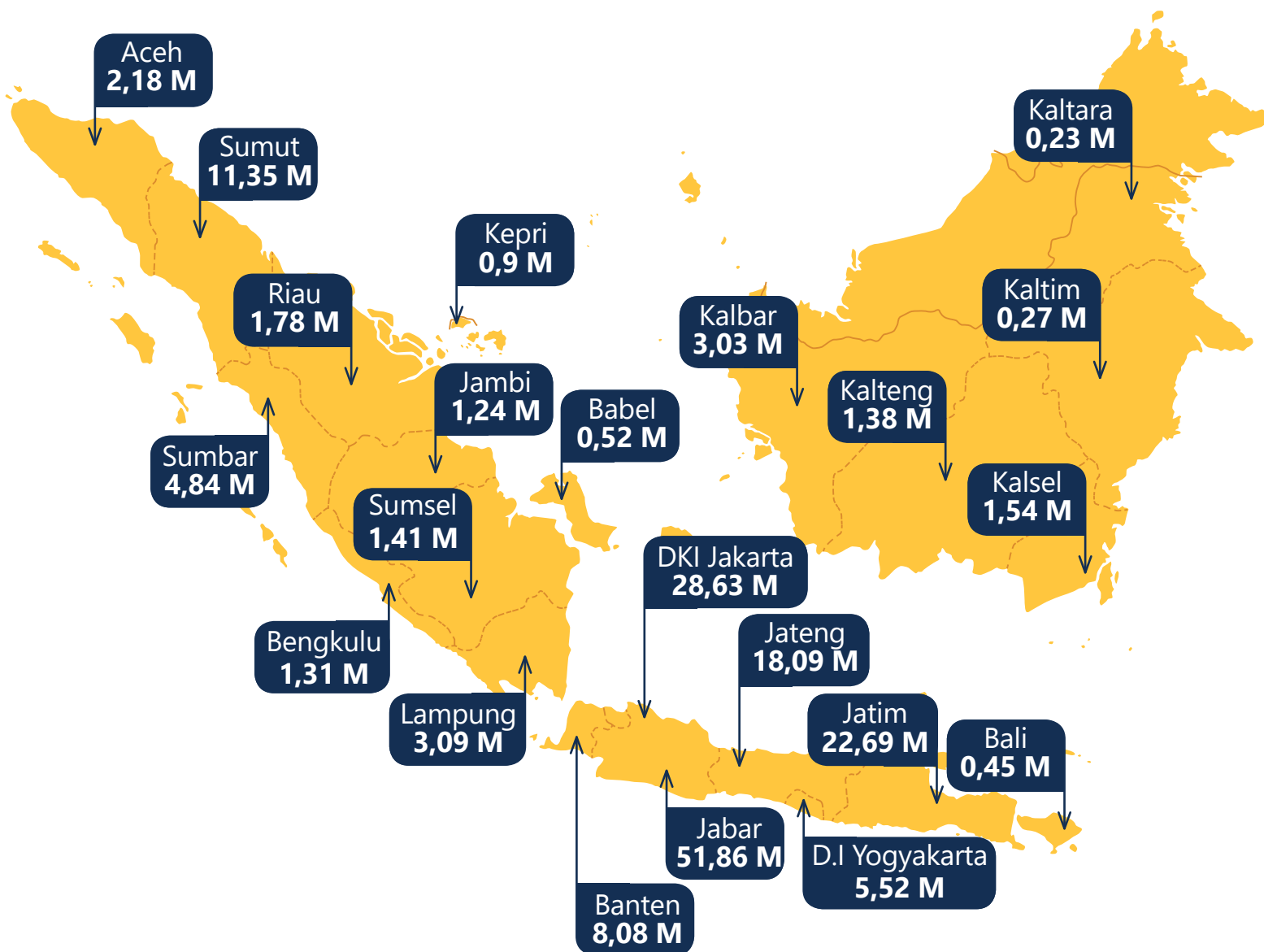
Strategi ini berhasil meningkatkan serapan anggaran hingga mencapai 93,3% dari total alokasi sebesar Rp194 miliar.

Ditahun mendatang, efisiensi dalam percepatan registrasi dan analisa proposal ini diharapkan akan semakin baik dengan akan dioperasikannya Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kemaslahatan mengingat jumlah anggaran Program Kemaslahatan akan meningkat menjadi 230 miliar rupiah, dengan ekspektasi jumlah persetujuan proposal mencapai 500 proposal atau dua kali lebih banyak dari Program Kemaslahatan tahun 2021.





SEBARAN WILAYAH DAN DANA PELAKSANAAN PROGRAM KEMASLAHATAN 2021



Distribusi kegiatan Kemaslahatan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah Jemaah haji tunggu yang ada di tiap provinsi. Sejak tahun 2020 lalu, pelaksanaan Program Kemaslahatan telah berhasil menjangkau 34 Provinsi di Indonesia. Provinsi dengan sebaran dana Kemaslahatan terbesar adalah Jawa Barat, yang saat ini tercatat sebagai provinsi dengan persentase jumlah jemaah haji tunggu terbesar di Indonesia.

Beberapa daerah seperti di DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta dilaksanakan program nasional, sehingga sebaran kegiatan Kemaslahatan di 2 provinsi tersebut ditambahkan dari alokasi nasional. Sedangkan untuk Gorontalo dan Kalimantan Barat, merupakan daerah yang direkomendasikan untuk diselenggarakan lebih banyak Program Kemaslahatan untuk memperkuat syiar dan dakwah Islam di kedua provinsi tersebut.



Pelaksanaan Program Kemaslahatan pada tahun 2021 didominasi oleh kegiatan konstruksi fisik (41% dari total kegiatan), dengan estimasi nilai manfaat sebesar 50 miliar rupiah. Faktor utama tingginya permohonan dan persetujuan proposal pada jenis kegiatan konstruksi adalah tingginya biaya yang dibutuhkan dan minimnya dana swadaya

masyarakat maupun manajemen pesantren dalam pembangunan konstruksi sarana dan prasarana ibadah maupun pembangunan asrama dan ruang kelas baru bagi para santri.



PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Amanah umat yang diemban oleh Bidang Kemaslahatan mencakup tanggung jawab atas dana yang disalurkan dengan mengukur efektivitas program yang dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara kualitatif maupun kuantitatif. [103-1]

Kemaslahatan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program yang diselenggarakan oleh divisi Pelaksanaan dan Monev Kemaslahatan. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan Kemaslahatan dilaksanakan sesuai dengan persetujuan. Bidang Kemaslahatan memastikan untuk dilakukan *improvement* dalam pelaksanaan kegiatan Kemaslahatan kedepan. [103-2]

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEMASLAHATAN



Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemantauan kinerja dari setiap tahapan kegiatan yang dilakukan sampai akhir kegiatan selesai dilaksanakan melalui laporan secara berkala atau mengunjungi dan mengobservasi secara langsung jalannya kegiatan.

Hasil pengukuran dan pemantauan selanjutnya dilakukan analisa dan evaluasi dengan tujuan :

- (1) memastikan bahwa sasaran program terpenuhi;
- (2) mengetahui kendala dan sumber risiko yang relevan;
- (3) mengetahui peluang yang relevan;
- (4) membantu penanggung jawab program dalam mengelola sumber daya dan mengendalikan;
- (5) memastikan bahwa program yang dilaksanakan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (6) memastikan bahwa program yang dilaksanakan tetap berpegang kepada asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

Pada tahun 2021, pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi masih terkendala oleh Pandemi COVID-19,

sehingga proses *monitoring* dilakukan secara daring sebagai alternatif *monitoring* secara fisik. Jumlah kegiatan *monitoring* sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 adalah sebanyak 7 (tujuh) kali melalui pelaksanaan progress report bulanan untuk setiap Mitra Kemaslahatan yang aktif melaksanakan program dan 8 (delapan) kali kunjungan secara fisik. [103-3]

Program Kemaslahatan yang dilaksanakan di tahun 2021 telah dilakukan evaluasi secara berkelanjutan. Hasil evaluasi baik dampak positif dan dampak negatif baik kepada BPKH ataupun kepada kesehatan & keselamatan penerima manfaat. [416-1] Bidang Kemaslahatan juga secara intens melakukan komunikasi dengan Mitra Kemaslahatan untuk dapat mengoptimalkan pengumpulan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Program Kemaslahatan.



SINERGI BERSAMA MITRA KEMASLAHATAN

RANTAI PASOKAN [102-9]



Menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Mitra Kemaslahatan merupakan strategi yang diambil Bidang Kemaslahatan BPKH dalam menjalankan amanahnya untuk mencapai tujuan peningkatan kemaslahatan bagi umat Islam secara lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. [103-1]

Kemitraan dengan organisasi kemaslahatan umat Islam bertujuan untuk mendorong penyaluran manfaat yang lebih besar, lebih komprehensif, lebih menjangkau kegiatan yang lebih beragam dan lokasi yang lebih tersebar. Dengan luas jangkauan wilayah tanah air mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota serta 16.056 pulau (data statistik BPS), lembaga sangat dibantu dengan jaringan operasional Mitra Kemaslahatan yang dimiliki.

Mitra Kemaslahatan adalah organisasi kemaslahatan umat Islam lainnya yang ditetapkan secara resmi oleh BPKH. Pemilihan, penunjukan dan penetapan Mitra Kemaslahatan dilakukan sesuai dengan mekanisme penyaluran nilai manfaat sebagaimana diatur pada Peraturan BPKH Nomor 2 Tahun 2019.

Bidang Kemaslahatan BPKH memastikan kredibilitas mitra dalam menjalankan amanah umat, oleh karena itu syarat dan kriteria untuk menjadi Mitra Kemaslahatan ditetapkan dan disesuaikan dengan Program Kemaslahatan yang akan dijalankan.

Hubungan kerjasama BPKH dengan Mitra Kemaslahatan diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPKH dan Mitra Kemaslahatan. Sebagai mitra kerjasama kinerja Mitra Kemaslahatan dipantau dan dievaluasi berdasarkan indikator kinerja program. [103-2]

Sepanjang tahun 2021, BPKH melalui Bidang Kemaslahatan menjalin kerjasama dengan 15 Mitra Kemaslahatan yang seluruhnya (100%) telah melalui seleksi dan penilaian yang ditetapkan termasuk aspek sosial dan 11 diantaranya aktif dalam menyalurkan dana kegiatan kemaslahatan kepada penerima manfaat. [414-1] Melalui sinergi dan kolaborasi bersama Mitra Kemaslahatan, BPKH dapat merealisasikan Program Kemaslahatan sebanyak 450 program atau senilai Rp122,4 miliar. [103-3]

DISTRIBUSI PROGRAM KEMASLAHATAN MELAU 11 MITRA KEMASLAHATAN





03

**KEGIATAN
KEMASLAHATAN**



Program Kemaslahatan 2021

SERAH TERIMA PEMBANGUNAN ASRAMA SMP-SMA SAINTEK MUHAMMADIYAH JONGGOL KABUPATEN BOGOR

DESA BALEKAMBANG, JONGGOL, BOGOR, JAWA BARAT
14 JULI 2022





KEGIATAN KEMASLAHATAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Peraturan BPKH Nomor 2 Tahun 2019 mensyaratkan distribusi penyaluran nilai manfaat dari Dana Abadi (DAU) menyasar ruang lingkup 6 (enam) kelompok kegiatan atau ruang lingkup Kemaslahatan, yaitu: pelayanan ibadah Haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, dan pembangunan sarana dan prasarana Ibadah. [103-2]

Selain itu, Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 3 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Kemaslahatan (Pasal 3), kegiatan Kemaslahatan dapat diberikan dalam rangka untuk kegiatan tanggap darurat yang ditujukan untuk mengatasi dampak bencana alam dan bencana non-alam.

Kegiatan Kemaslahatan memberikan kontribusi langsung dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia dengan memanfaatkan jangkauan dan kemitraan dalam pelaksanaannya. Sasaran kegiatan Kemaslahatan selaras dengan beberapa target SDGs yang relevan. Terdapat 8 Tujuan Global dimana Bidang Kemaslahatan memiliki peluang untuk memberikan manfaat yang signifikan melalui ruang lingkup kegiatannya. [103-1]







PELAYANAN IBADAH HAJI [103-3, 413-1]

Kegiatan dalam lingkup pelayanan ibadah haji diadakan dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji baik sebelum, selama dan pasca kegiatan ibadah haji. Lingkup kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan dukungan pelayanan

haji di dalam negeri dan/ atau di luar negeri; melaksanakan bimbingan manasik haji; dan/atau menyediakan sarana-prasarana ibadah haji di dalam dan/atau di luar negeri.

NILAI PENYALURAN MANFAAT (Rp)



17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

1

SASARAN PRIMER

Mengurangi indirect cost dalam pelayanan haji.

2

SASARAN SEKUNDER

Meningkatkan kualitas haji jangka panjang,

3

SASARAN TERSIER

Kemaslahatan umat secara umum.

Pemerintah Indonesia menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji akibat pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, menjadi pertimbangan utama dalam penetapan kebijakan tersebut.

Kegiatan Kemaslahatan pada ruang lingkup pelayanan ibadah haji di tahun 2021 dilaksanakan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendaftaran haji baik melalui Kementerian Agama maupun pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji

(KBIH) yang dapat langsung bertemu dengan calon pendaftar haji dan melayani para pendaftar haji.

Peningkatan sarana dan prasarana ini penting dilakukan untuk memberikan manfaat secara berkelanjutan, agar penyelenggaraan ibadah haji dapat dilaksanakan lebih efisien dan memberikan kenyamanan bagi Jemaaah. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penyaluran nilai manfaat pada ruang lingkup pelayanan haji di tahun 2021 tetap dilakukan.

KEGIATAN



Pengadaan sarana digitalisasi data untuk kantor KBIHU Anggrek Residence



Pengadaan 19 unit mobil operasional Jemaah Haji dan Umroh

PENDIDIKAN DAN DAKWAH [103-3, 413-1]

Majunya peradaban suatu bangsa dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan dalam perspektif Islam ditempatkan sebagai pondasi dalam membentuk kepribadian Muslim agar mampu mengembangkan potensi rohani dan jasmani mereka sehingga tercipta sumber daya manusia unggul.

Berdasarkan pertimbangan inilah, isu pendidikan ditempatkan sebagai salah satu sasaran yang perlu

direspons oleh Program Kemaslahatan. Dalam lingkup pendidikan dan dakwah, pelaksanaan kegiatan Kemaslahatan bertujuan untuk pengembangan dan pemberdayaan umat Islam dan/atau penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta dukungan kegiatan yang berkaitan dengan syiar agama Islam termasuk pengadaan sarana prasarana dakwah.

1

SASARAN PRIMER

Membangun karakter umat, khususnya pada pendidikan level anak usia dini untuk membangun sikap mental dan budi pekerti (akhlakul karimah).

2

SASARAN SEKUNDER

Membangun karakter masyarakat yang tangguh dan mandiri sesuai dengan karakter yang diamanahkan Islam.

3

SASARAN TERSIER

Membangun program dakwah di daerah terluar dan terpencil serta daerah rawan akidah.



4.1 Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
4.3 Menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau.
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua



6.2 Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua.



17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

NILAI PENYALURAN MANFAAT (Rp)

2021

Rp61.400.800.176

2020

Rp45.247.389.400

2019

Rp3.956.958.000

KEGIATAN



Bantuan pendidikan bagi 250 santri dhuafa



Pengadaan kendaraan operasional bagi 26 pondok pesantren, madrasah, Yayasan pendidikan

Pembangunan/rehabilitasi sarana sanitasi dan bersuci bagi 7 pondok pesantren

Beasiswa bagi 128 pelajar Perguruan Tinggi (beasiswa sang surya lazismu dan beasiswa lazismu)



Pembangunan/renovasi/rehabilitasi asrama bagi 36 pondok pesantren



Bantuan pembangunan 1 Taman Pendidikan Alquran



Pembangunan/renovasi/rehabilitasi ruang belajar/kelas bagi 68 pondok pesantren, madrasah, Yayasan pendidikan



Bantuan pengadaan sarana pendidikan bagi 15 pondok pesantren, madrasah dan Yayasan pendidikan



MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN TINGGI MELALUI PROGRAM BEASISWA

Di tahun 2021, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meluncurkan Program Beasiswa Sang Surya. Sebuah program yang dirancang untuk memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa Perguruan Tinggi. Melalui Mitra Kemaslahatan Lazismu Pusat, program ini dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Beasiswa dalam bentuk biaya SPP semester, telah diberikan kepada 62 mahasiswa yang berasal dari Fakultas Pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Syariah. Selain berprestasi dengan IPK Minimal 3,25 pemberian beasiswa ini diutamakan berasal dari keluarga tidak mampu (Fakir, Miskin, Muallaf, Gharimin, dan Sabilillah).

BPKH juga bekerjasama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, untuk menyelenggarakan program similar, melalui Mitra Kemaslahatan LazisNu. Program yang diberi nama Beasiswa Nusantara NU Care – LazisNU dan BPKH, telah memberikan beasiswa kepada 66 mahasiswa semester 1 yang memenuhi persyaratan prestasi akademik maupun administrasi.

Program Beasiswa merupakan inisiatif terbaru Program Kemaslahatan dalam ruang lingkup Pendidikan dan Dakwah, dimana bantuan yang diberikan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh penerima manfaat. Peluncuran program ini merupakan langkah awal dalam meningkatkan akses dan motivasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, di masa mendatang, program serupa akan terus dikembangkan dengan mitra kerjasama yang lain.





KESEHATAN [103-3, 413-1]

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, serta merupakan hak dasar setiap individu. Hal ini selaras dengan makna kesehatan dalam Islam, yaitu menjadi modal utama dalam melaksanakan ibadah dan pekerjaan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Oleh karenanya, salah satu lingkup kegiatan Kemaslahatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia.

Sebagaimana ajaran kesehatan sesuai dengan syariat Islam yang mewajibkan setiap umat untuk menjaga kebersihan diri, kegiatan Kemaslahatan dalam ruang lingkup ini tidak hanya berupa kegiatan reaktif, namun juga mencakup kegiatan proaktif, seperti dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana sanitasi, dan pengadaan sumber air bersih.

1

SASARAN PRIMER

Menjaga dan meningkatkan kesehatan calon jemaah haji sebelum melaksanakan ibadah haji, melalui program *preventif*.

2

SASARAN SEKUNDER

Mendukung lembaga kesehatan untuk dapat melengkapi berbagai peralatan kesehatan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat luas.

3

SASARAN TERSIER

Mendukung peningkatan layanan kesehatan yang dibutuhkan komunitas masyarakat tertentu.

NILAI PENYALURAN MANFAAT (Rp)

2021

Rp21.868.828.150

2020

Rp53.238.066.700

2019

Rp13.773.293.600

Pengadaan alat kesehatan untuk RS, mencakup: ventilator, USG, mesin Apheresis, dan alat kesehatan lainnya



KEGIATAN

Pengadaan bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19, mencakup: COVID kit, Imun booster, PCR test, paket makanan saji dll



Pengadaan 48 mobil Ambulance

Perbaikan pipa saluran air untuk pengadaan air bersih bagi masyarakat korban gempa Malang di Lumajang



3.3 Memerangi penyakit menular lainnya.
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang



6.2 Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua.



17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

PENINGKATAN AKSES LAYANAN KESEHATAN MELALUI AMBULANS TERAPUNG

Layanan kesehatan merupakan isu yang harus ditangani dengan serius, karena menyangkut kesehatan dan nyawa manusia. Untuk itu, diperlukan fasilitas penunjang untuk mendukung pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis terutama di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau.

Diantaranya adalah Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Wilayah ini berada di lokasi yang dikelilingi oleh sungai, sehingga beberapa daerah tertentu dalam Kabupaten tersebut hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai. Oleh karena itu, sangat diperlukan sarana transportasi air untuk melayani dan menjangkau pasien yang berada di daerah perairan.



Merespon kondisi tersebut, Lazismu, BPKH dan Baitul Mal Muamalat, melalui dana Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji berinisiatif memberikan bantuan 3 unit ambulan terapung kepada puskesmas yang memiliki wilayah kerja di perairan, yaitu: Puskesmas Sungai Karawang, Puskesmas Air Putih dan Puskesmas Galing.

Dukungan ini diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan efektifitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada di lingkungan sekitar puskesmas tersebut.



SOSIAL KEAGAMAAN [103-3, 413-1]

Kegiatan Kemaslahatan pada ruang lingkup sosial keagamaan ditujukan untuk meningkatkan peran serta organisasi massa Islam dalam mencapai kemaslahatan umat, meliputi dukungan aktivitas masyarakat dan pemberdayaan umat Islam. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan juga ditujukan untuk memberikan manfaat, tidak hanya kepada umat Islam, namun kepada masyarakat yang lebih luas.

Tujuan ini sejalan dengan syariat Islam yang memiliki titik singgung yang sangat kompleks dengan masalah-masalah sosial, karena syariat Islam juga mengatur hubungan antara sesama manusia. Masalah-masalah sosial keagamaan Islam meliputi semua aspek kehidupan sosial dan ajaran

Islam telah meletakkan landasan yang kuat dan fleksibel bagi sikap dan perilaku dalam disiplin sosial, agar tercipta hubungan yang harmonis dengan sesama.



NILAI PENYALURAN MANFAAT (Rp)

2021

Rp63.715.219.785

2020

Rp30.504.229.622

2019

Rp836.870.000

Pengadaan sarana dan prasarana untuk masjid dan organisasi umat Islam



KEGIATAN

Pengadaan 39 unit kendaraan layanan umat dan operasional untuk masjid dan organisasi umat Islam



Program tebar qurban 1.000 ekor sapi di 34 provinsi



Bantuan tanggap darurat bagi korban bencana banjir, tanah longsor dan gempa di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Jakarta, Jawa Barat, Tangerang, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur



1.5 Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana



2.1 Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun



17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.



BERKAH QURBAN HINGGA KE PELOSOK NEGERI

Perayaan Idul Adha 1442 Hijriyah, menjadi semakin istimewa bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Program Tebar Qurban 1.000 ekor sapi yang didistribusikan ke 835 titik lokasi di 34 provinsi di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga pulau terluar Sebatik, serta wilayah lain seperti Papua dan Papua Barat.

Pelaksanaan program dilakukan oleh BPKH, bekerjasama dengan Mitra Kemaslahatan seperti Nucare Lazisnu, LazisMu, DT Peduli, Baznas, PPPA Darul Quran, BSMU, Solo Peduli, Laz Ummul Quro dan Rumah Zakat. Protokol kesehatan ketat tetap dipatuhi, mulai dari proses pemotongan yang dilaksanakan di rumah potong hewan, hingga pendistribusian, yang dilakukan secara langsung kerumah penerima manfaat akhir.

Program ini juga mengupayakan dukungan terhadap ketahanan pangan. Sebagian daging qurban diolah menjadi berbagai jenis produk seperti kornet, rendang siap santap, Abon yang dikemas higienis agar dapat didistribusikan kepada masyarakat yang berada di wilayah terpencil, terluar, tertinggal dan terdampak bencana.

Momentum Hari Raya Idul Adha menjadi saat yang tepat untuk membantu sesama, pemilihan lokasi distribusi di wilayah terpencil di tanah air diharapkan agar berkah dari Qurban ini dapat turut dirasakan masyarakat di seluruh tanah air.



SERAH TERIMA BANTUAN PROGRAM KEMASLAHATAN SARANA & PRASARANA KEPADA DAIRUL HIKAM DIGITALISA, MAJALAH, DAN MROH SERTA PE... NAL



EKONOMI UMAT [103-3, 413-1]

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Populasi yang dominan tidak selamanya menjadi yang dominan dalam perekonomian. Salah satu isu yang dihadapi masyarakat muslim Indonesia adalah kemiskinan dan ke fakiran. Merespon hal ini, Kegiatan Kemaslahatan dalam lingkup ekonomi umat dilaksanakan dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, yang meliputi program-program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian dalam ekonomi.

Program Kemaslahatan dalam lingkup ekonomi umat mulai dilaksanakan sejak tahun 2020, BPKH terus meningkatkan upaya dan inisiatif yang

memungkinkan untuk dilakukan sehingga nilai manfaat Dana Abadi Umat dapat terus dinikmati dan kesejahteraan umat dapat meningkat. Di tahun 2021, penyaluran nilai manfaat pada ruang lingkup ekonomi umat telah meningkat sebesar 8 (delapan) kali dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai manfaat yang diperuntukan pada ruang lingkup Ekonomi Umat disalurkan kepada pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan maupun UMKM dalam bentuk hibah alat produksi, bantuan modal usaha, pembinaan dan pendampingan kelompok usaha warga atau kepala keluarga binaan. Program Kemaslahatan pada ruang lingkup ini dijalankan dengan bersinergi bersama Mitra Kemaslahatan.

1

SASARAN PRIMER

Meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan industri kecil yang berkaitan dengan dengan haji.

2

SASARAN SEKUNDER

Pembiayaan bergulir, *cash collateral*, jaminan agunan atau *blended fund* melalui kerjasama dengan perbankan syariah.

3

SASARAN TERSIER

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas umat Islam untuk mendukung kemandirian ekonomi.

NILAI PENYALURAN MANFAAT (Rp)

2021

Rp8.843.906.596

2020

Rp1.001.150.000

2019

-

KEGIATAN

Pengadaan sarana dan prasarana produksi dan usaha bagi 12 koperasi dan kelompok usaha kecil



Program pemberdayaan ekonomi pada pondok pesantren A-Mashduqiyah, pesanteren Al-Ittifaq, Kelompok peternak Tangguh di Kota Salatiga, Kelompok Tani Berkah Sawargi di Kabupaten Bogor

1 MENGHAPUS KEMISKINAN



1.2 Mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

2 MENGAKHIRI KELAPARAN



2.3 Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya keluarga petani, dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, dan peluang nilai tambah.

10 MENGURANGI KETIMPANGAN



10.1 Secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN



17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

MENGANGKAT EKONOMI MUSTAHIK MELALUI PROGRAM BALAI TERNAK

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama dengan Mitra Kemaslahatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyelenggarakan program Balai Ternak, salah satu program unggulan pada ruang lingkup ekonomi umat, di Pondok Pesantren Al Ittifaq Kabupaten Bandung dan di Pondok Pesantren Al Mashduqiyah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Program ini merupakan wujud perhatian BPKH terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Pelaksanaan program ditujukan kepada 15 (lima belas) Kelompok Ternak di wilayah Kabupaten Bandung dan 10 (sepuluh) kelompok ternak di wilayah Kabupaten Bandung Barat.



BPKH menyalurkan dana Kemaslahatan, secara total, lebih dari Rp3 miliar yang dialokasikan dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan mulai dari penyelenggaraan pelatihan hingga pendampingan kepada para peserta program, yang mencakup penguatan kapasitas usaha dan kelembagaan.

Pendekatan ini diharapkan dapat mewujudkan kemandirian yang dicita-citakan, yaitu: kemandirian secara ekonomi, kemandirian secara kelembagaan, dan kemandirian secara mental spiritual, serta dapat memperkuat perekonomian di lingkungan Pondok pesantren.



MENINGKATKAN EKONOMI NELAYAN MELALUI FREEZER TRUCK

Salah satu tantangan masyarakat daerah pesisir, khususnya nelayan, dalam upaya meningkatkan perekonomiannya adalah tidak tersedianya fasilitas

yang memadai untuk menangani ikan dan hasil laut lainnya secara baik, akibatnya, nelayan tidak memiliki kemampuan untuk memasarkan hasil penangkapan mereka secara optimal.

Koperasi Nelayan Mina Makmur Lestari Krui, yang terletak di Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, adalah satu dari sekian banyak koperasi di Indonesia yang menghadapi tantangan tersebut. Melalui Program Kemaslahatan BPKH bersama Mitra Kemaslahatan NU Care LAZISNU memberikan mobil halal food, *freezer truck* untuk memuat hasil penangkapan nelayan, kepada Koperasi Nelayan Mina Makmur Lestari Krui agar dapat disalurkan ke kota lainnya.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat setidaknya untuk 1.500 orang, yang merupakan anggota Koperasi Nelayan Mina Makmur Lestari Krui, yang pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan perekonomian wilayah setempat.

PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA IBADAH [103-3, 413-1]

Tempat ibadah, termasuk sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ibadah adalah hal yang penting ketersediaanya, mengingat ibadah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap umat Islam. Sarana dan prasarana yang memadai pun menjadi salah satu faktor kenyamanan dalam beribadah yang pada akhirnya mampu meningkatkan motivasi seseorang untuk beribadah dengan lebih baik.

Atas dasar tersebut, pembangunan sarana dan prasarana ibadah menjadi salah satu ruang lingkup yang tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan kegiatan Kemaslahatan. Dalam lingkup ini kegiatan Kemaslahatan dilaksanakan dalam rangka memastikan tersedianya sarana-prasarana untuk menunjang terselenggaranya ibadah umat muslim.

1

SASARAN PRIMER

Membantu pembangunan dan rehabilitasi masjid/mushola, termasuk prasarana yang dibutuhkan, terutama di daerah rawan akidah, daerah terluar dan daerah tertinggal.

2

SASARAN SEKUNDER

Merevitalisasi masjid/mushola sehingga mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada jemaah untuk peribadahan dan mendukung dakwah.

3

SASARAN TERSIER

Menguatkan peran masjid/mushola dalam peradaban Islam.

NILAI PENYALURAN MANFAAT (Rp)

2021

Rp21.183.469.967

2020

Rp26.653.099.500

2019

Rp6.489.073.750

KEGIATAN



Bantuan pembangunan/
rehabilitasi 99 masjid/mushola
dan atau fasilitasnya



MEMBUMIKAN AL-QUR'AN HINGGA KE PELOSOK NEGERI

Berkolaborasi dengan 5 Mitra Kemaslahatan yang terdiri dari LazisMU, NU Care-LazisNU, DT Peduli, Rumah Zakat dan PPPA Daarul Qur'an, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meluncurkan Program Kemaslahatan BPKH Berbagi Mushaf. Sebanyak 11.110 mushaf Al-Qur'an didistribusikan keseluruh wilayah di Indonesia dalam rangka membumikan Al-Qur'an di Indonesia.

Acara peluncuran Program Kemaslahatan BPKH Berbagi Mushaf bertepatan dengan 17 Ramadan 1442 Hijriah yang juga diperingati sebagai *Nuzulul Quran* yakni peristiwa kali pertama diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW.

Mengambil hikmah dari peristiwa besar tersebut, kegiatan berbagi Al-Qur'an ini juga merupakan upaya BPKH dalam meningkatkan akses dan memenuhi kebutuhan Al-Qur'an, khususnya bagi umat Islam yang berada di wilayah terpencil.



Program tebar Al-Quran di 29 Provinsi

Pengadaan/
revitalisasi
sound system
di 18 masjid/
mushola



17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.



04

**TATA KELOLA
KEMASLAHATAN**



PEMROV JABAR



BPKH
Badan Pengelola Keuangan Haji



PROGRAM KEMASLAHATAN BP
PEMBANGUNAN
MASJID ASSALA
BANDUNG

TATA KELOLA

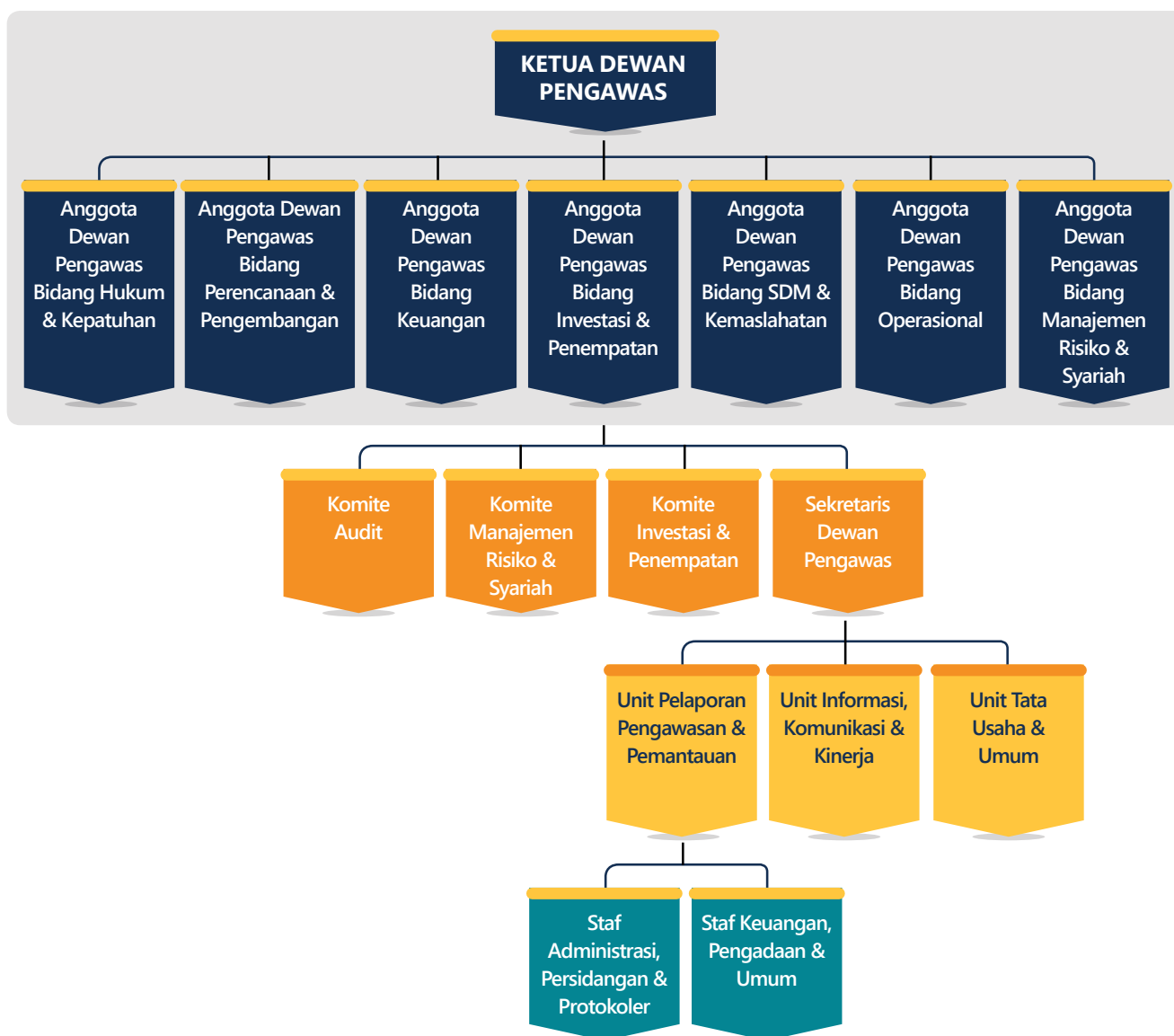
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 3 butir c tentang Pengelolaan Keuangan Haji dinyatakan bahwa salah satu tujuan pengelolaan keuangan haji adalah untuk meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Dengan berlandaskan pada ketentuan tersebut, BPKH menyelenggarakan Program Kemaslahatan yang merupakan bagian dari fungsi BPKH untuk memberikan manfaat lainnya kepada umat.

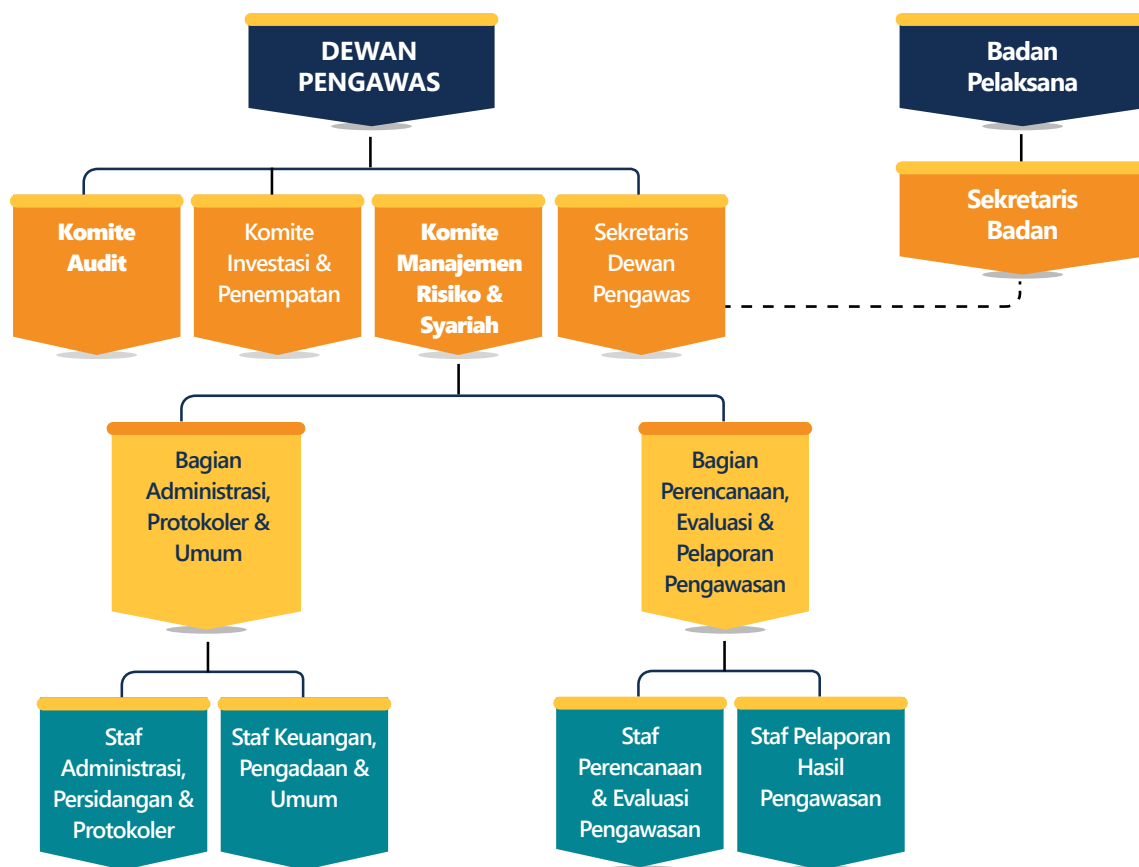
BPKH memiliki serangkaian aturan dalam pelayanan Program Kemaslahatan yang berfungsi sebagai

pedoman dalam kegiatan operasional Program Kemaslahatan. Pelaksanaan tata kelola yang baik merupakan tanggung jawab seluruh jajaran BPKH untuk membangun lembaga yang sehat, tangguh dan memenuhi prinsip-prinsip syariah.

BPKH senantiasa melakukan proses evaluasi terhadap penerapan tata Kelola organisasi yang dilakukan secara berkala. Penilaian dilakukan oleh Bidang Kepatuhan atau pihak lain sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

STRUKTUR TATA KELOLA [102-18]





ORGAN PENGELOLA PROGRAM KEMASLAHATAN

Sebagai organ terpenting dalam pengelolaan Program Kemaslahatan, Bidang Kemaslahatan BPKH memegang amanah dibawah supervisi Deputy Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan. Dalam pelaksanaannya Bidang Kemaslahatan memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap penerapan tata kelola yang berlaku di BPKH.

Anggota Badan Pelaksana Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan (Anggota A6) memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab atas penyelenggaraan dukungan administrasi perkantoran, mengkoordinasikan hubungan antar lembaga, mengelola kehumasan BPKH serta mengkoordinasikan kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Organ pengelola Program Kemaslahatan lain adalah Deputy Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan. Deputy Kesekretariatan Badan Kemaslahatan bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan dukungan

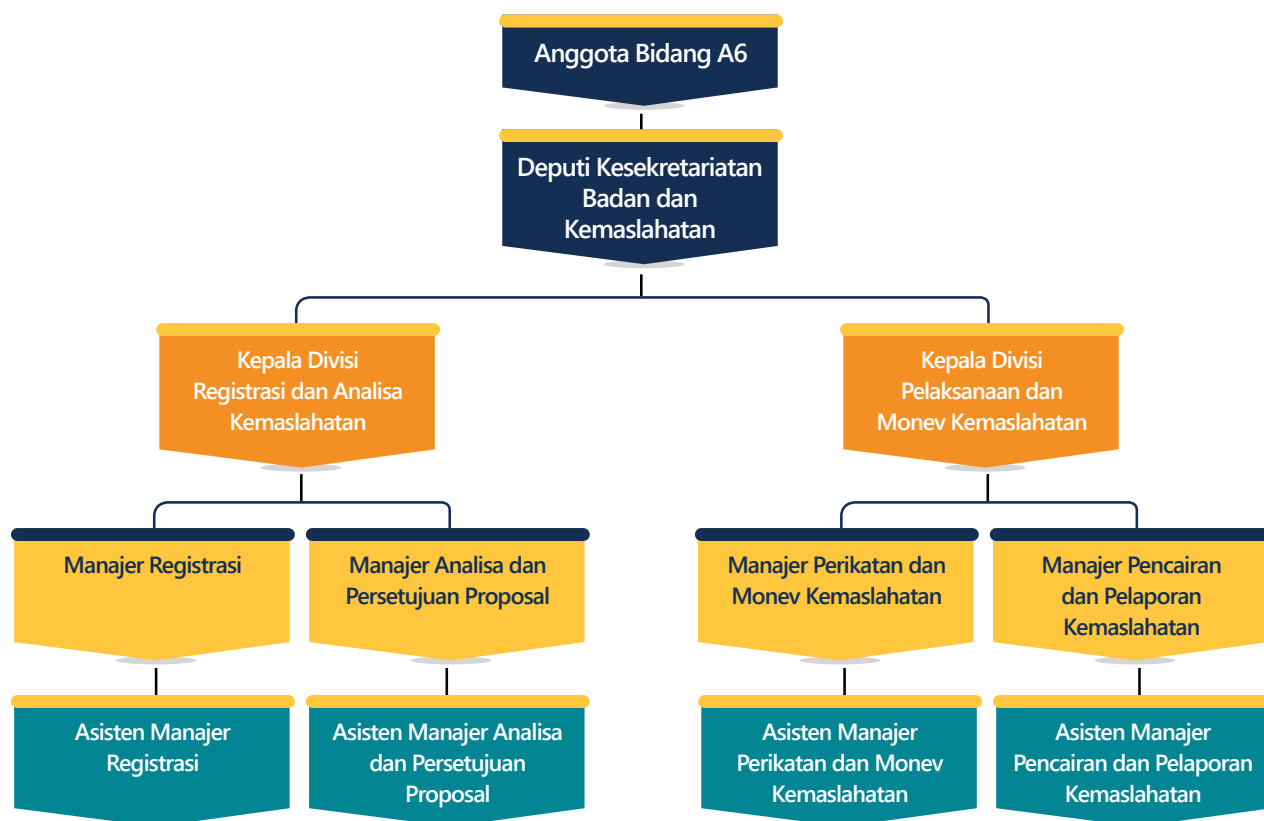
administrasi perkantoran, mengkoordinasikan hubungan antar lembaga, pengelolaan kehumasan BPKH dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kemaslahatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Organ Pengelola selanjutnya adalah Kepala Divisi Registrasi dan Analisa Kemaslahatan bertugas untuk melaksanakan koordinasi kegiatan registrasi dan analisa Kemaslahatan atas proposal yang diterima.

Organ pengelola kegiatan Kemaslahatan berikutnya adalah Kepala Divisi Pelaksanaan dan Monev Kemaslahatan bertugas untuk melaksanakan koordinasi proses kegiatan perikatan, pencairan, pelaksanaan, monev dan laporan pertanggung jawaban atas kegiatan Kemaslahatan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang individu maupun kolektif dari organ Kemaslahatan dapat dilihat pada Laporan Tahunan BPKH.

STRUKTUR ORGANISASI KEMASLAHATAN





MANAJEMEN RISIKO

Potensi risiko yang dapat menghambat tercapainya visi, misi dan tujuan dipastikan oleh BPKH dengan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan mitigasi risiko. Pengelolaan risiko di BPKH dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengacu kepada Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko yang telah disusun dan menjadi pedoman utama bagi seluruh insan BPKH. [102-11]

BPKH juga melakukan penerapan Manajemen Risiko yang merupakan bagian dari penerapan *Governance, Risk and Compliance* (GRC). Fokus penerapan Manajemen Risiko harus menciptakan nilai tambah, terintegrasi dan efektif, bagian dari proses pengambilan keputusan, transparan, sistematis, terstruktur dan dinamis.

Bidang Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan Peraturan BPKH no 3 tahun 2018 yang terdiri dari 2 (dua) divisi, yaitu Divisi Manajemen Risiko Bisnis dan Divisi Manajemen Risiko Korporasi.

Sebagai panduan dalam mengelola risiko, pedoman manajemen risiko disusun dan ditinjau minimal setiap 2 (dua) tahun sekali atau jika terjadi perubahan visi, misi dan sasaran manajemen risiko.

Sebagai pemilik risiko (*risk owner*), masing-masing divisi pada Bagian Kemaslahatan BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan risiko. Peranan *Risk Owner* sangat penting sebagai garis depan atau ujung tombak dalam mengelola dan mengendalikan risiko. Namun dalam peningkatan tata kelola yang baik, Bidang Kemaslahatan juga di bantu dalam pengelolaan risiko Hukum dan Kepatuhan oleh Bidang Hukum dan Kepatuhan melalui Kajian Hukum dan Kepatuhan serta oleh Bidang Manajemen Risiko untuk risiko Reputasi dan Keberlanjutan.

Beberapa jenis risiko yang berpotensi terjadi pada pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan mencakup ;

- ① Risiko Strategik
- ② Risiko Hukum
- ③ Risiko Reputasi
- ④ Risiko Operasional
- ⑤ Risiko Kepatuhan

KODE ETIK

Setiap insan yang berada pada Bidang Kemaslahatan harus patuh dan tunduk pada Kode Etik yang ditetapkan oleh BPKH tanpa pengecualian. Tujuan dari Kode etik bagi seluruh insan di BPKH adalah untuk menciptakan standar perilaku yang baik secara moral dan emosional dalam melaksanakan tugas untuk dan atas nama lembaga, maupun dalam berinteraksi dan berhubungan dengan sesama rekan kerja, dengan atasan maupun bawahan. [103-1]

Pedoman Etika Kerja yang dimiliki BPKH menjadi sarana untuk membentuk budaya kerja yang positif. Pedoman dalam Etika Kerja ini juga memberikan acuan perilaku yang harus dilakukan oleh seluruh insan BPKH dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari.

KODE ETIK BPKH MENCAKUP:

1. Penegakan integritas.
2. Menjaga kerahasiaan.
3. Larangan penyalahgunaan jabatan.
4. Kepatuhan penggunaan dokumen.
5. Larangan benturan kepentingan.



ISI ETIKA KERJA ATAU TATA PERILAKU

PEJABAT DAN PEGAWAI MELIPUTI: [102-16]

1. Kepatuhan terhadap hukum.
2. Benturan kepentingan.
3. Pengendalian gratifikasi.
4. Anti diskriminasi.
5. Integritas laporan keuangan.
6. Perlindungan informasi BPKH.
7. Informasi orang dalam (insider trading).
8. Perlindungan harta BPKH.
9. Kegiatan sosial dan politik.
10. Perilaku etis terhadap sesama karyawan.

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi memberikan manfaat khususnya bagi umat Islam, BPKH berupaya untuk menjadi lembaga yang terpercaya serta memberikan manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, dalam proses pengembangan dan pengelolaan DAU yang merupakan bagian dari Dana Haji yang diamanahkan pengelolaannya kepada BPKH, diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip dan asas yang diatur dalam Peraturan BPKH nomor 3 tahun 2018, yaitu :

- 1 Prinsip Syariah;
- 2 Prinsip Kehati-hatian [102-11];
- 3 Asas Manfaat;
- 4 Asas Nirlaba;
- 5 Asas Transparan; dan
- 6 Asas Akuntabel

ANTI KORUPSI [103-2, 103-3]

BPKH juga menerapkan Peraturan BPKH No.3 Tahun 2018 mengenai Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi dalam bentuk dan keadaan apapun. Peraturan ini dibuat untuk mempengaruhi insan BPKH agar mampu melakukan atau tidak melakukan hal-hal dalam kapasitas jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dan/atau bertentangan dengan independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan.

Selain diatur dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji, ketentuan mengenai gratifikasi juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Pada tahun 2021, BPKH kembali mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 pada ruang lingkup kegiatan Penghimpunan Dana, Investasi, Penempatan, Kemaslahatan, Keuangan, Pengadaan



dan Umum, Sumber Daya Manusia, Legal, Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Dengan diperolehnya sertifikasi ISO 37001:2016 membuktikan bahwa BPKH telah berkomitmen mendukung program pemerintah untuk mencegah tindakan korupsi dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO 37001:2016.

Sosialisasi terkait kebijakan gratifikasi telah dilakukan kepada seluruh (100%) Insan Bidang Kemaslahatan, begitu juga pelatihan anti korupsi, dalam hal ini adalah ISO 37001 yang telah diikuti pada tahun 2021. [205-1]

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Dalam proses pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran, BPKH mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji. Peraturan yang sama juga memberikan jaminan kerahasiaan dan perlindungan bagi Pelapor pelanggaran.

Seluruh pemangku kepentingan dapat menyampaikan pengaduan melalui telepon, sms dan *Whatsapp* di nomor 085319000140/085319000150 atau telepon kepada Anggota Badan Pelaksana Bidang Kepatuhan dan/atau petugas khusus di bawah Bidang Kepatuhan yang ditunjuk (disebut "*Whistleblower Officer*" atau "*WB Officer*"). Selain itu BPKH juga telah memiliki aplikasi

Whistleblowing System yang tersedia di website resmi BPKH yang beralamat di www.bpkh.go.id.

Dalam sistem pelaporan ini, pihak pelapor dari internal maupun eksternal dapat menyampaikan kecurigaannya maupun ketidak puasannya terkait pelanggaran yang dapat terdiri, namun tidak terbatas atas pelanggaran berupa *fraud*, kesalahan operasional yang signifikan, pelanggaran ketentuan BPKH, pelanggaran kode etik BPKH, benturan kepentingan (*conflict of interest*), tindakan melanggar etika dan moral, tindakan melanggar hukum pidana maupun hukum perdata ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Selama tahun 2021, BPKH tidak menerima laporan terkait adanya kasus pelanggaran etika, termasuk korupsi dan gratifikasi.



INSAN KEMASLAHATAN [102-8]

Kinerja penatalaksanaan Program Kemaslahatan yang menjadi tugas dan kewenangan Bidang Kemaslahatan tidak terlepas dari dukungan insan Kemaslahatan yang dimiliki. Oleh karena itu Bidang Kemaslahatan memandang sumber daya manusia ini merupakan aset utama mengoptimalkan pencapaian tujuan Program Kemaslahatan. [103-1]

Tidak berbeda dengan Divisi lainnya yang berada dalam naungan BPKH, Bidang Kemaslahatan melakukan pengelolaan SDM mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan yang disesuaikan dengan strategi dan tujuan organisasi, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

BPKH menggunakan pendekatan yang terintegrasi untuk proses seleksi-rekrutmen, pengembangan SDM, pengelolaan kinerja, kompensasi dan tunjangan, administrasi pengelolaan kepersonaliaan, serta sistem informasi SDM yang memadai. Seluruh SDM diberikan peluang yang sama serta diperlakukan secara adil dan setara.[103-2]

Di bawah supervisi Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan, Bidang Kemaslahatan saat ini memiliki 9 personil dari total pegawai BPKH sebanyak 187 orang hingga 31 Desember 2021. Sepanjang tahun 2021, terdapat penambahan insan Kemaslahatan sebanyak 3 (tiga orang) yaitu 1 Manajer dan 2 Asisten Manajer, dan tidak ada insan Kemaslahatan yang mengundurkan diri. [401-1]







Jumlah personil organik ini masih jauh dari ideal mengingat cakupan kewilayahan yang luas dan kegiatan Kemaslahatan yang cenderung meningkat setiap tahun. Bidang Kemaslahatan mengakui untuk mendukung optimasi pencapaian target dan kelancaran proses bisnis program dan kegiatan kemaslahatan diperlukan penambahan personil yang bekerja secara organik sehingga dibutuhkan penyesuaian personil untuk mengelola Kegiatan Kemaslahatan yang tersebar di seluruh provinsi.

Di tengah keterbatasan personil, Bidang Kemaslahatan tetap mampu menjalankan program Kemaslahatan secara maksimal dengan senantiasa menjaga semangat kerjasama, komunikasi, dan hubungan sosial antar individu untuk menciptakan atmosfir kerja yang baik. [103-3]

Saat ini Bidang Kemaslahatan terdiri dari 2 divisi yaitu divisi Registrasi dan Analisa Kemaslahatan dengan 2 (dua) orang Manajer dan 1 Asisten Manajer serta divisi Pelaksanaan dan Monev Kemaslahtan dengan 2 (dua) orang Manajer dan 1 (satu) orang asisten Manajer. [102-10]

Sesuai dengan Peraturan BPKH Nomor 10 tahun 2018, seluruh pegawai dilakukan penilaian atas kinerjanya, minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Tidak terkecuali insan Kemaslahatan, selama periode tahun 2021 seluruh insan Kemaslahatan telah dievaluasi. Hasil evaluasi akan menjadi pertimbangan dalam rencana suksesi maupun peningkatan kompensasi yang diberikan. BPKH menghargai seluruh SDM yang dimilikinya, apresiasi ditunjukkan dengan memenuhi kewajiban atas remunerasi dan fasilitas yang berhak diterima sesuai dengan peraturan yang berlaku.

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA [102-8]

	2021		2020		2019	
	 Laki-laki	 Perempuan	 Laki-laki	 Perempuan	 Laki-laki	 Perempuan
Berdasarkan usia						
< 30 tahun	2	0	0	1	0	2
30 – 50 tahun	6	1	5	1	4	0
Berdasarkan status ketenagakerjaan						
Permanen	8	1	5	1	4	1
Non-permanen	0	0	0	1	0	1
Berdasarkan jabatan						
Deputi	1	0	1	0	1	0
Kadiv	1	1	1	0	1	0
Staff	6	0	3	2	2	2
Berdasarkan pendidikan						
> S2	1	0	1	0	1	0
S1 – S2	7	1	4	1	3	1
< S1	0	0	0	1	0	1

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan BPKH Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Kepegawaian, BPKH sebagai organisasi induk melakukan Pengembangan Pegawai sebagai upaya dalam meningkatkan produktivitas, keterampilan dan kemampuan SDM. [103-1]

Program Pengembangan Pegawai dilakukan dengan menyelenggarakan program pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan keterampilan atau kemampuan yang diselenggarakan sendiri atau oleh badan-badan lain baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan kebutuhan.

Ruang lingkup pengembangan yang dilaksanakan tidak hanya mencakup keahlian teknis namun juga untuk diarahkan untuk meningkatkan kapasitas soft skill seperti *negotiation skill*, *analytical skill*, *legal drafting*, praktek litigasi, sertifikasi project management, pelatihan *appraisal analysis* dan ekonomi syariah. [103-2]

BPKH juga senantiasa mendorong peningkatan kapasitas insan Kemaslahatan yang dimiliki, untuk memperluas pengetahuan dan ketrampilan pada







berbagai program pengembangan/diklat yang sesuai dengan kebutuhan.

Melalui upaya ini diharapkan insan Kemaslahatan akan memiliki wawasan yang luas dan adaptif terhadap tantangan yang dihadapi serta memberi inspirasi untuk memanfaatkan peluang yang muncul.

Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sepanjang tahun 2021 masih menghadirkan tantangan penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Pegawai ini. Kegiatan pengembangan SDM yang telah diagendakan diselenggarakan secara daring memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. [103-3]

Program pengembangan SDM yang diikuti oleh insan Bidang Kemaslahatan selama tahun 2021 :

- 1 Sertifikasi Internasional OCEG Certified Policy Management Professional (CPMP)
- 2 Corporate Coach Program
- 3 CPMP
- 4 Governance Risk Compliance Professional
- 5 Coach The Coach

RATA-RATA JAM PELATIHAN [404-1]	2021		2020		2019	
	 Laki-laki	 Perempuan	 Laki-laki	 Perempuan	 Laki-laki	 Perempuan
Level Manajemen	24	24	16	-	48	-
Level karyawan non-managemen	24	0	16	16	32	32

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN [102-40, 102-42, 102-43, 102-44]

BPKH juga selalu berusaha memahami kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Pelibatan pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan program untuk mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kemaslahatan umat Islam.

Dengan proses pelibatan pemangku kepentingan, Bidang Kemaslahatan merumuskan program-program dan membuat kebijakan dalam menjalankan aktivitasnya dengan penuh tanggungjawab. Bidang Kemaslahatan BPKH melakukan identifikasi pemangku kepentingan berdasarkan pertimbangan atas pengaruh dampak terhadap Program Kemaslahatan.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	KEPENTINGAN DAN HARAPAN/ISU YANG RELEVAN	METODE DAN FREKUENSI KETERLIBATAN
1.	Badan Pelaksana BPKH	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan dana sesuai target - Keberlanjutan program - Kepatuhan peraturan - Eksistensi BPKH (syiar dan <i>branding</i>) 	Rapat badan pelaksana (1x/minggu) Rakor dengan anggota badan pelaksana (setiap hari)
2.	Dewan Pengawas BPKH	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan dana sesuai target - Keberlanjutan program - Kepatuhan peraturan - Eksistensi BPKH (syiar dan <i>branding</i>) 	Rapat gabungan (1x/bulan) Laporan bulanan Rapat Evaluasi 3 bulan sekali/triwulan
3.	Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> - Program prioritas - Program pendukung pelaksanaan ibadah haji 	Rapat prioritas (awal tahun, atau saat ada perubahan)
4.	Komisi VIII DPR	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan dana - Program 	Laporan, Alokasi besaran anggaran Usulan program (proposal)
5.	Mitra Kemaslahatan (Lembaga non profit)	<ul style="list-style-type: none"> - Program - Sumber dan jumlah penggunaan dana - Usulan dan pelaksanaan kegiatan Kemaslahatan 	Rapat Koordinasi Bulanan, mingguan.
6.	Penerima Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> - Program 	Sosialisasi
7.	Kementrian Keuangan	Sumber penempatan dana dan jumlah dana	Rapat penempatan DAU (1x per tahun)
8.	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Program - Sumber dan jumlah penggunaan dana 	Sosialisasi Mempublikasi kegiatan di berbagai media
9.	Presiden	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan dana - Kepatuhan peraturan 	Laporan melalui Kementerian Agama
10.	Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Tata Kelola - Transparansi - Penilaian kinerja - Pengembangan 	<i>Gathering</i> , pelatihan



05

**T E N T A N G
L A P O R A N**



PROFIL LAPORAN

Laporan Program Kemaslahatan 2021 merupakan laporan keempat yang diterbitkan oleh Bidang Kemaslahatan BPKH. Laporan diterbitkan setiap tahunnya, dan laporan terakhir periode 2020 telah diterbitkan pada bulan Desember 2021. [102-51, 102-52]

Pada Laporan periode ini disajikan informasi kinerja Program Kemaslahatan untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2021. [102-50] Laporan yang keempat tahun ini mengusung tema laporan “Meningkatkan Ikhtiar, Memperluas Manfaat”.

Sebagai Lembaga Keuangan yang berintegritas dan transparan, Bidang Kemaslahatan BPKH menerbitkan laporan Program Kemaslahatan ini setiap tahun dengan tujuan untuk memberikan informasi secara transparan mengenai upaya yang telah dilakukan untuk memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat Islam.

Laporan Program Kemaslahatan ini disusun sesuai dengan GRI Standards 2016 dengan opsi inti. [102-54] Walaupun Bidang Kemaslahatan BPKH bukanlah lembaga yang diwajibkan menerbitkan Laporan Keberlanjutan, namun laporan ini juga disusun merujuk pada Lampiran II Peraturan Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Bidang Kemaslahatan belum menggunakan jasa pemeriksa eksternal dalam penyajian laporan ini. Namun seluruh isi laporan telah ditinjau dan diverifikasi oleh tim internal guna memastikan kesesuaian dan kebenaran atas data yang disajikan. [102-56]

RUANG LINGKUP DAN BATASAN

Fokus utama dalam laporan ini adalah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Bidang Kemaslahatan BPKH yang terjadi selama tahun 2021, termasuk kinerja serta dampak yang diakibatkannya, begitu laporan ekonomi yang disampaikan hanya terkait dengan penyelenggaraan Program Kemaslahatan. [102-45]

Selama periode pelaporan Bidang Kemaslahatan tidak mengikuti inisiatif eksternal dan tidak tergabung dalam asosiasi. [102-12, 102-13]

KONTAK

BPKH sebagai lembaga keuangan yang transparan dan Professional selalu terbuka untuk setiap masukan, saran, kritik dan pertanyaan. Hal ini merupakan upaya kami dalam rangka meningkatkan kualitas laporan. Saran, masukan, pertanyaan dapat ditujukan ke : [102-53]

Bidang Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)



Menara Bidakara 1, lantai 2,
Jalan Gatot Subroto, Kav. 71-73
Pancoran, Jakarta Selatan 12870,
Indonesia



Telp : (021) 83793001



Email : kemaslahatan@bpkh.go.id

PENENTUAN KANDUNGAN LAPORAN [102-46]

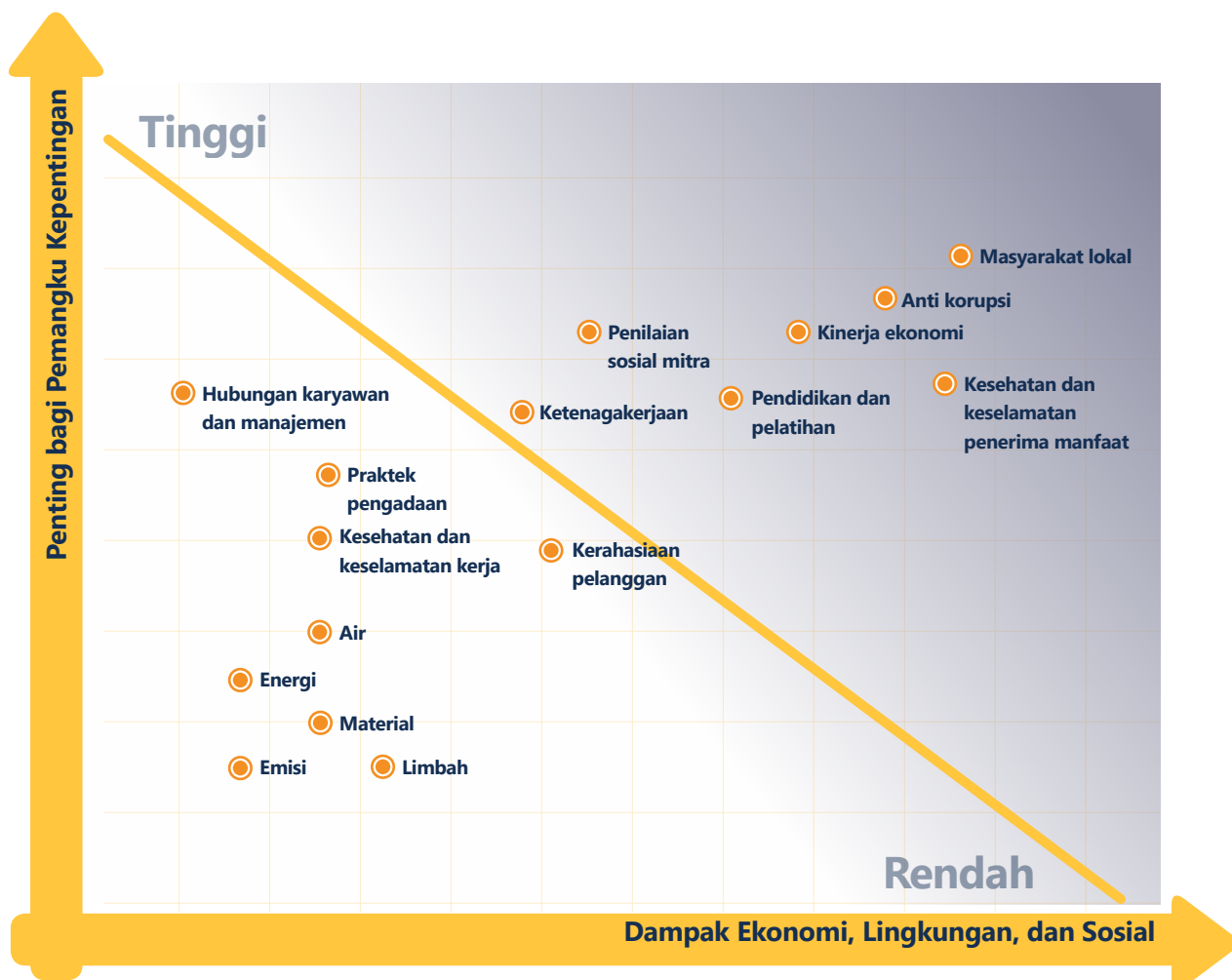
Prinsip penentuan kandungan laporan yang kami buat dalam menentukan kandungan laporan keberlanjutan ini, sesuai dengan ketentuan Standar GRI, yang mencakup: Pelibatan pemangku kepentingan; Materialitas; Konteks keberlanjutan;

dan Kelengkapan. Selain itu untuk memastikan kualitas informasi laporan, menerapkan prinsip-prinsip Kejelasan, Komparabilitas, Keseimbangan, Akurasi, Keandalan dan Ketepatan Waktu.

TOPIK MATERIAL DAN BATASANNYA [102-46]

Penyajian topik material pada laporan keberlanjutan periode 2021 ini, berdasarkan hasil peninjauan dari laporan yang disajikan pada tahun sebelumnya. Adapun tujuannya adalah agar informasi material yang disajikan merupakan informasi yang paling relevan yang dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan.

Proses peninjauan dilakukan secara internal, melibatkan para penanggung jawab yang relevan dengan topik yang material. Berdasarkan hasil *focus group discussion*, topik material yang disajikan pada periode ini tidak ada perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya. [102-49]



DAFTAR TOPIK MATERIAL DAN BATASANNYA [102-47, 103-1]

TOPIK MATERIAL	MENGAPA MATERIAL	STANDAR GRI	BIDANG KEMASLAHATAN	BATASAN		
				BPKH	MASYARAKAT	MITRA
Masyarakat lokal	Program Kemaslahatan ditujukan untuk masyarakat lokal, khususnya umat Islam	413-1				
Kinerja ekonomi	Salah satu fokus perhatian Pemangku Kepentingan dan Bidang Kemaslahatan	201-1				
Anti korupsi	Bagian dari tata kelola lembaga yang harus diterapkan di seluruh manajemen dan pegawai	205-1				
Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat	Tujuan program adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi umat, kesehatan dan keselamatan tentunya menjadi bagian dari hal ini	416-1				
Penilaian sosial mitra	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Kemaslahatan merupakan kegiatan sosial yang spesifik untuk kemaslahatan umat. Maka penting bagi lembaga untuk bekerja sama dengan mitra yang memiliki visi yang sama.	414-1				
Pendidikan dan pelatihan	Memiliki pegawai dengan kompetensi yang mumpuni memungkinkan kegiatan dapat dilakukan secara optimal	404-1				
Ketenagakerjaan	Pegawai merupakan sumber daya yang paling penting bagi lembaga sebagai penggerak kegiatan Program Kemaslahatan	401-1				

GRI CONTENT INDEX – CORE OPTION [102-55]

	Pengungkapan	Halaman
GRI 102: Pengungkapan Umum	PROFIL ORGANISASI	
	102-1 Nama organisasi	17
	102-2 Merek, produk, dan jasa utama	17
	102-3 Lokasi kantor pusat	17
	102-4 Jumlah negara tempat operasi	17
	102-5 Sifat kepemilikan dan badan hukum	17
	102-6 Pasar yang dilayani	17
	102-7 Skala organisasi	17
	102-8 Informasi terkait karyawan dan pekerja lain	67
	102-9 Rantai pasokan organisasi	36
	102-10 Perubahan signifikan selama periode pelaporan	67
	102-11 Prinsip kehati-hatian	63
	102-12 Inisiatif Eksternal	72
	102-13 Keanggotaan asosiasi	72
	STRATEGI	
	102-14 Pernyataan dari manajemen puncak	6-7
	ETIK DAN INTEGRITAS	
	102-16 Nilai-nilai, standar dan norma-norma perilaku	64
	TATA KELOLA	
	102-18 Struktur tata kelola	60
	PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN	
	102-40 Daftar kelompok pemangku kepentingan	69
	102-41 Perjanjian Kerja Bersama	N/A
	102-42 Identifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan	69
	102-43 Pendekatan untuk melakukan pelibatan pemangku kepentingan	69
	102-44 Topik dan perhatian utama	69
	PRAKTIK PELAPORAN	
	102-45 Entitas yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian	72
	102-46 Proses untuk menetapkan isi laporan dan Batasan topik	73
	102-47 Daftar topik material	74
	102-48 Pernyataan ulang atas informasi	25
	102-49 Perubahan dalam pelaporan	73
	102-50 Periode pelaporan	72
	102-51 Tanggal laporan paling terakhir	72
	102-52 Siklus pelaporan	72
	102-53 Poin Kontak atas pertanyaan terkait laporan ini	72
	102-54 Klaim pelaporan yang 'kesesuaian dengan' Standar GRI	72
	102-55 Indeksisi GRI	75
	102-56 Pemeriksaan eksternal	72

Pengungkapan			Halaman
		KINERJA EKONOMI	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	24, 74
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	24
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	25
GRI 201 Kinerja Ekonomi 2016	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	Penyajian data disesuaikan dengan konteks Bidang Kemaslahatan
		ANTI KORUPSI	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	74
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	65
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	65
GRI 205 Anti Korupsi 2016	205-1	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi	65
		KETENAGAKERJAAN	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	66, 74
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	66
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	66
GRI 401: Ketenagakerjaan 2016	401-1	Tenaga Kerja Baru dan Turnover	67
		PELATIHAN DAN PENDIDIKAN	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	68, 74
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	68
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	68
GRI 404- Pelatihan dan Pendidikan 2016	404-1	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan	68
		MASYARAKAT LOKAL	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	40, 74
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	40
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	42-57

Pengungkapan			Halaman
GRI 413 Masyarakat Lokal 2016	413-1	Operasi dengan pelibatan masyarakat, penilaian dampak, dan program pengembangan	42-57
		PENILAIAN SOSIAL SUPPLIER	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	36, 74
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	36
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	36
GRI 414 Penilaian Sosial Supplier 2016	414-1	Supplier baru yang dinilai berdasarkan kriteria sosial	36
		KESEHATAN DAN KESELAMATAN PELANGGAN	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan Topik Material dan Batasannya	34,74
	103-2	Pendekatan Manajemen dan Komponennya	34
	103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen	35
GRI 416 Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan produk dan jasa	35

INDEKS POJK-51/2017

Indeks	Kriteria	Halaman
A	Strategi Keberlanjutan	
A.1	Penjelasan strategi keberlanjutan	26
B	Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan	4
C	Profil singkat organisasi	17
C.1	Visi, misi dan nilai	18
C.2	Nama, alamat, nomor telepon, faksimili, alamat surat elektronik dan situs web	17
C.3	Skala usaha	17
C.4	Penjelasan singkat mengenai produk, layanan dan kegiatan yang dijalankan	17
D	Penjelasan direksi	
D.1	Kebijakan untuk merespon tantang andalam pemenuhan strategi keberlanjutan	6-7

Indeks	Kriteria	Halaman
D.2	Penerapan keuangan berkelanjutan	6-7
D.3	Strategi pencapaian target	6-7
E	Tata kelola keberlanjutan	
E.1	Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan	60, 62
E.2	Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan	60, 62
E.3	Penjelasan mengenai prosedur LJK, Emiten dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas Keuangan Berkelanjutan	63
E.4	Penjelasan mengenai pemangku kepentingan	69
E.5	Permasalahan yang dihadapi	7
F	Kinerja keberlanjutan	
F.1	Penjelasan mengenai budaya keberlanjutan	64
F.2	Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam tiga tahun terakhir	25
	Aspek Ketenagakerjaan	
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai	68
	Aspek Masyarakat	
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar	42-57
F.24	Pengaduan Masyarakat	65
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)	42-57
	Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan	
F.27	Produk/Jasa Yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan	35
F.28	Dampak Produk/Jasa	42-57
G	Lain-lain :	
G.3	Lembar Umpan Balik	80
G.5	Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/2017	77



LEMBAR UMPAN BALIK

LEMBAR UMPAN BALIK

Laporan Kemaslahatan Tahun 2021 memberikan informasi mengenai kegiatan Program Kemaslahatan yang dijalankan selama periode tersebut. Kami sangat berharap untuk dapat menerima masukan, umpan balik

atau saran untuk perbaikan di masa mendatang. Anda dapat mengisi lembar umpan balik ini dan mengirimkannya kembali kepada kami.

Nama : _____
Institusi : _____
Email : _____
No. Kontak : _____

Group pemangku kepentingan

- ☐ Penerima Manfaat
- ☐ Masyarakat Umum
- ☐ Pemerintah (pusat/daerah)
- ☐ Media
- ☐ Mitra Kemaslahatan
- ☐ Komunitas Perhajian
- ☐ Lainnya (sebutkan) _____

Mohon pilih jawaban yang paling sesuai dengan memberikan tanda √ :

1. Laporan ini mencakup informasi yang menjadi perhatian Anda
☐ Ya ☐ Tidak
2. Laporan ini memberikan informasi secara menyeluruh dan transparan
☐ Ya ☐ Tidak
3. Laporan ini menarik dan dirancang dengan baik
☐ Ya ☐ Tidak
4. Topik apakah yang menurut Anda paling informatif dan bermanfaat ?

5. Selain yang telah disajikan, informasi apakah yang ingin Anda peroleh melalui laporan ini ?

6. Harap berikan masukan dan saran bagaimana kami dapat membuat laporan ini lebih baik di masa mendatang

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu mengisi lembar umpan balik ini. Silahkan kirimkan lembar ini kepada kami melalui kontak yang tersedia

Divisi Kemaslahatan

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Menara Bidakara 1, lantai 5 Jalan Gatot Subroto, Kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan 12870, Indonesia

Telp : (021) 83793001

Email : kemaslahatan@bpkh.go.id



BIDANG KEMASLAHATAN



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

Menara Bidakara 1, lantai 2 Jalan Gatot Subroto,
Kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan 12870, Indonesia

Telp : (021) 83793001

Call Center Kemaslahatan : 08882298820

Email : kemaslahatan@bpkh.go.id

www.bpkh.go.id